

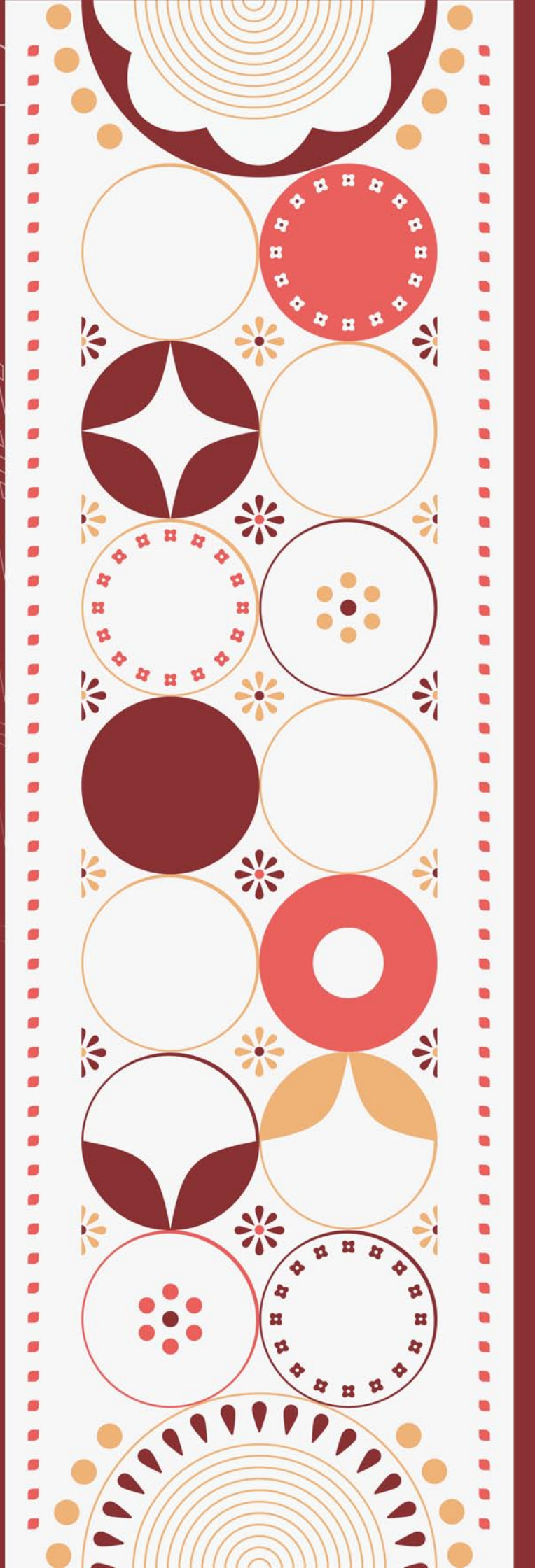


Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Umum **2024**

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIN, merupakan wujud pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kewenangan yang diberikan, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Hal ini searah dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Dana Transfer Umum (Direktorat DTU) sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan telah menyusun LAKIN Direktorat DTU Tahun 2024. Dalam Lakin ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Direktorat DTU pada tahun 2024. Diharapkan LAKIN Dit. DTU dapat memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat DTU, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil serta pencapaian visi misi organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Direktorat DTU.

Selain untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan, Lakin Direktorat DTU Tahun 2024 juga merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan internal Direktorat DTU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Direktorat DTU sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Jakarta, 12 Februari 2025

Direktur Dana Transfer Umum,



Ditandatangani secara elektronik

Sandy Firdaus



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Tugas dan Fungsi.....	11
B. Struktur Organisasi.....	11
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi.....	12
D. Sumber Daya Manusia	15
E. Sumber Pendanaan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Visi, Misi, dan Tujuan	21
B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan	21
C. Indikator Kinerja Utama 2024.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
1a – CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	30
1b – CP Indeks Integritas Organisasi	35
3c – N Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	37
2a – CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	41
3a – CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD.....	45
3b – CP Indeks Ketimpangan Antarwilayah.....	49
4a – CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....	53
5a – CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti ...	58
5b – N Tingkat Kualitas Monitoring DTU	61
5c – N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti.....	64
6a – CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.....	65
6b – N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	68
7a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	72

B. Realisasi Anggaran	76
C. Kinerja Lainnya	77
BAB IV PENUTUP	79
BAB V LAMPIRAN	81
A. Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024.....	81
B. Formulir Pengukuran Kinerja	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat DTU	12
Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTU Tahun 2024	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	16
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III.....	16
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	17
Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia.....	17
Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTU Tahun 2019 s.d. 2024	30
Grafik 7. Perbandingan target dan realisasi indeks Kebijakan DTU tahun 2021-2023 dan Indeks Kebijakan Belanja Negara tahun 2024	44
Grafik 8. Perbandingan target dan realisasi indeks ketimpangan antar wilayah	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Dana Transfer Umum	8
Tabel 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTU berdasarkan Program/Kegiatan	18
Tabel 3. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024	19
Tabel 4. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DTU Tahun 2024	22
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTU Tahun 2024.....	23
Tabel 6. Perkembangan IKU Direktorat DTU TA 2021 s.d. TA 2024.....	24
Tabel 7. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024.....	27
Tabel 8. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	32
Tabel 9. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	32
Tabel 10. Perkembangan IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020-2024	33
Tabel 11. Capaian Indeks integritas Organisasi	35
Tabel 12 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas	36
Tabel 13. Hasil survey indeks kepuasan publik atas layanan DTU	38
Tabel 14. Capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU	39
Tabel 15 Perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2019-2024	40
Tabel 16. Perbandingan Nilai Setiap Aspek Layanan yang Disurvei (2019-2024).....	40
Tabel 17. Capaian indeks efektivitas kebijakan DTU.....	42
Tabel 18. Penghitungan capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan Belanja Negara.....	42
Tabel 19. Daftar Subkegiatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya	43
Tabel 20. Data Subkegiatan tagging penurunan stunting.....	43
Tabel 21. Penghitungan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	46
Tabel 22. Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	46
Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio TKD Berbasis Kinerja Terhadap TKD Tahun 2019-2024	47
Tabel 24. Capaian indeks ketimpangan antarwilayah	50
Tabel 25. Data Penghitungan Indeks Theil.....	51
Tabel 26 Perbandingan target dan realisasi dari tahun 2019-2024.....	52
Tabel 27. Daftar PMK Perencanaan ditetapkan tahun 2024	54
Tabel 28. Daftar PMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2024.....	55
Tabel 29. Daftar KMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2024.....	55
Tabel 30. Capaian IKU nilai kinerja regulasi	56
Tabel 31. Penghitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi	56
Tabel 32. Perkembangan IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas tahun 2020-2024	58
Tabel 33. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024 ..	60

Tabel 34. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	60
Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	60
Tabel 36. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU	62
Tabel 37. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU Tahun 2021 – 2023	63
Tabel 38. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti ...	64
Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti tahun 2020-2024	65
Tabel 40. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	66
Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2020-2024.....	67
Tabel 42. Realisasi IKU nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat DTU tahun 2024.....	69
Tabel 43. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	70
Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	70
Tabel 45. Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	73
Tabel 46. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU.....	73
Tabel 47. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU TW IV Tahun 2024	74
Tabel 48. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	74
Tabel 49. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024.....	76

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Dana Transfer Umum adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja pemerintah pusat, pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Umum.

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Dana Transfer Umum Tahun 2024, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Dimana pada tahun 2024 Direktorat DTU telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis, dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama. Tujuh Sasaran Strategis tersebut dan tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Dana Transfer Umum

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				106,37
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			106,37
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	84	94,97	113,06
1b – CP	Indeks Integritas Organisasi	100	106,02	106,02
1c – N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4,67	4,77	102,14
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				111,45
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			102,89

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
2a – CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85	87,46	102,89
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat dan Akuntabel			120
3a – CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	13,83%	19,68%	120
3b – CP	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,23	0,143	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				114,14
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			120
4a – N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	117,20	120
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			113,61
5a – CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74
6b – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	84%	97,3%	115,81
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	120%	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,41
6.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			113,53
6a – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
6b – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	111,12	120
7.	Pengelolaan keuangan yang optimal			110,82
7b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	105,83%	110,82
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,25

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat DTU Tahun 2024 sebesar 112,25. Pencapaian nilai NKO 2024 merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat DTU tahun 2024, yaitu:

- sebesar 106,37 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 114,79 dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 116,81 dari bidang *internal process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 115,41 dari bidang *Learning and Growth perspective* (bobot 25%);

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) merupakan unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil sesuai dengan amanat PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Dana Transfer Umum menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

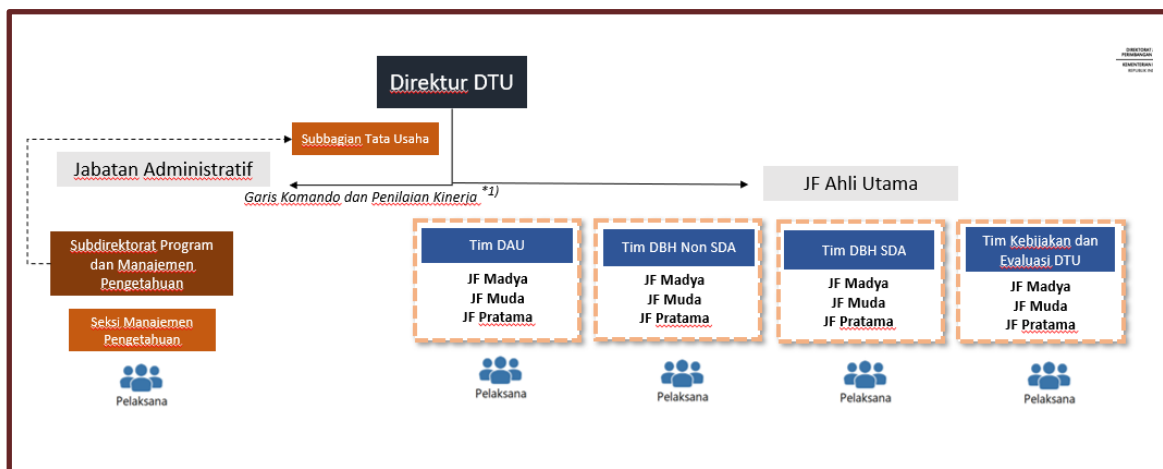
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 6) pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja pemerintah pusat;
- 7) pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum; dan
- 8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Umum.

B. Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, Direktorat DTU didukung oleh:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat DTU



C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Aspek dan isu strategis organisasi Direktorat DTU terkandung dalam rencana Strategis (Renstra) DTU Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan Direktorat DTU untuk periode 5 (lima) tahun tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra DJPK Tahun 2020-2024 serta penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan arah kebijakan DJPK pada tahun 2020-2024, strategi Direktorat DTU antara lain:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Kebijakan DBH dalam rangka mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain:

- 1) Menyiapkan reformulasi kebijakan percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan mengoptimalkan penggunaan pagu penyaluran DBH Tahun Anggaran berjalan;
 - 2) Menyiapkan reformulasi pembagian alokasi Dana Bagi Hasil yang bersifat *earmark* untuk menghasilkan pembagian DBH yang lebih proporsional;
 - 3) Menyiapkan reformulasi pembagian alokasi DBH yang berdasarkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. Kebijakan DAU dalam rangka mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain:
- 1) Menyusun reformulasi kebijakan pengalokasian DAU dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan, potensi ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan;
 - 2) Menyusun indikator keseimbangan fiskal yang mencerminkan pemerataan pendanaan dalam rangka pemerataan penyediaan layanan dasar publik; dan
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas alokasi DAU dengan melakukan analisis terhadap data yang digunakan dalam perhitungan DAU.

2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Adapun strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Kebijakan DBH dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas, antara lain:
- 1) Pengendalian alokasi DBH Tahun Anggaran berjalan melalui penyesuaian terhadap realisasi DBH selama 5 tahun terakhir dalam rangka mengurangi potensi lebih bayar DBH;
 - 2) Penajaman penggunaan DBH *earmark* (DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Kehutanan – Dana Reboisasi) yang mendukung kebijakan Cukai Hasil Tembakau untuk mengatasi dampak negatif rokok, dan mendukung kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan.
- b. Kebijakan DAU dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas, antara lain:
- 1) Penyaluran alokasi DAU untuk mempertimbangkan pemenuhan indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; dan
 - 2) Penyaluran alokasi DAU secara asimetris berdasarkan realisasi belanja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya keuangan dan kebutuhan belanja di daerah, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan belanja daerah serta mengurangi SILPA yang terjadi di akhir tahun.

3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah:

- a. DBH CHT diarahkan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani tembakau, buruh tani, dan/atau buruh pabrik rokok antara lain melalui program:
 - 1) Peningkatan kualitas bahan baku dengan berfokus kepada kegiatan kemitraan antara petani tembakau dengan perusahaan mitra, pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen, dan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
 - 2) Pembinaan lingkungan sosial dengan berfokus kepada kegiatan bantuan bibit/benih/pupul dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi pertanian bagi petani tembakau dan subsidi harga tembakau.
- b. DBH Kehutanan - Dana Reboisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan fokus kegiatan beruoa pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RHT), pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pengembangan kawasan ekowisata.
- c. Kebijakan dukungan terhadap reformulasi DAU yang produktif, inklusif dan berkeadilan, antara lain:
 - 1) Membangun indikator *unit cost* dan target layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terukur dan mereflesikan kebutuhan fiskal;
 - 2) Mendorong penggalan potensi penerimaan umum daerah dalam rangka kemandirian fiskal.
- d. Kebijakan dukungan penggunaan DAU yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, dengan memperluas penggunaan belanja wajib DTU, Infrastruktur untuk program pemulihan ekonomi nasional dan dukungan penguatan sumber daya manusia.

4. Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi keuangan Daerah dan Big Data sebagai Basis Utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemanfaatan pemantauan dan evaluasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data yaitu : (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan sistem pajak nasional; (c) sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing; dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran. Adapun strategi yang diterapkan:

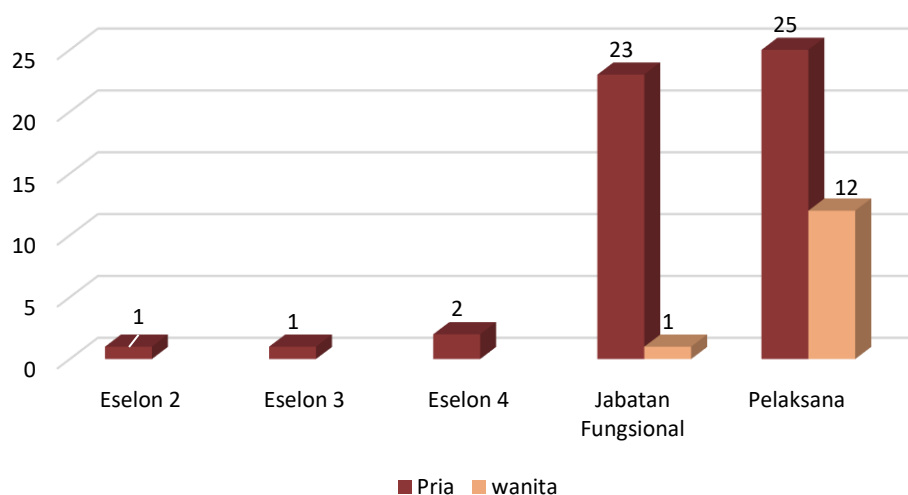
- a. Penyaluran DBH yang dikaitkan dengan kinerja penggunaan dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan mendorong pengelolaan sanitasi lingkungan;
- b. Penguatan pemantauan dan evaluasi DAU yang karakteristik kewilayahan (spasial), potensi ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan antara lain:
 - 1) Monitoring penggunaan DAU yang bersifat *block grant* melalui penerapan Bagan Akun Standar (BAS) di daerah yang mampu mendeteksi atribut Sumber dana DAU.
 - 2) Penguatan kualitas dan kelengkapan sumber data keuangan dan non keuangan dalam rangka mendukung evaluasi reformulai dan penggunaan DAU yang produktif, inklusif dan berkeadilan.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi merupakan aset yang paling penting bagi Direktorat DTU dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategis Direktorat DTU Tahun 2024, penguatan strategis dalam kelompok *learning and growth perspective*. Secara umum jumlah pegawai Direktorat Dana Transfer Umum per 31 Desember 2024 adalah 65 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 13 orang (20%) dan jumlah pegawai laki-laki 52 orang (80%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat DTU dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

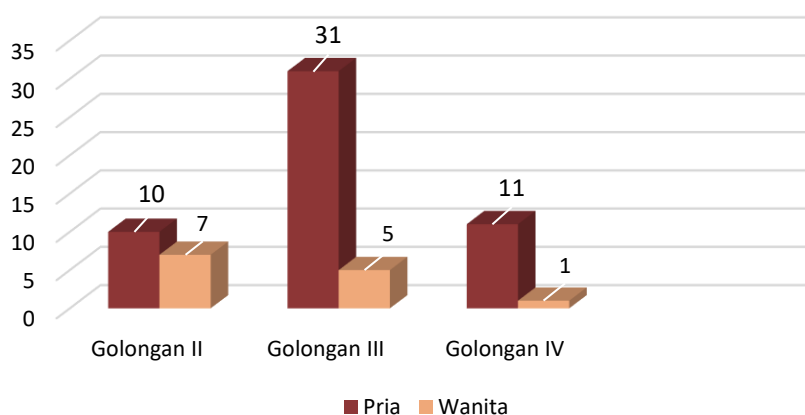
Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

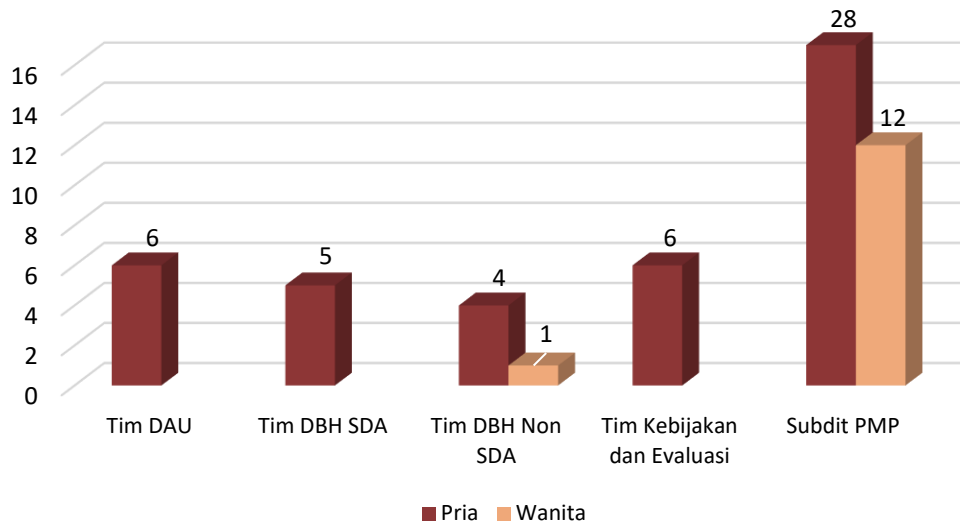
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III

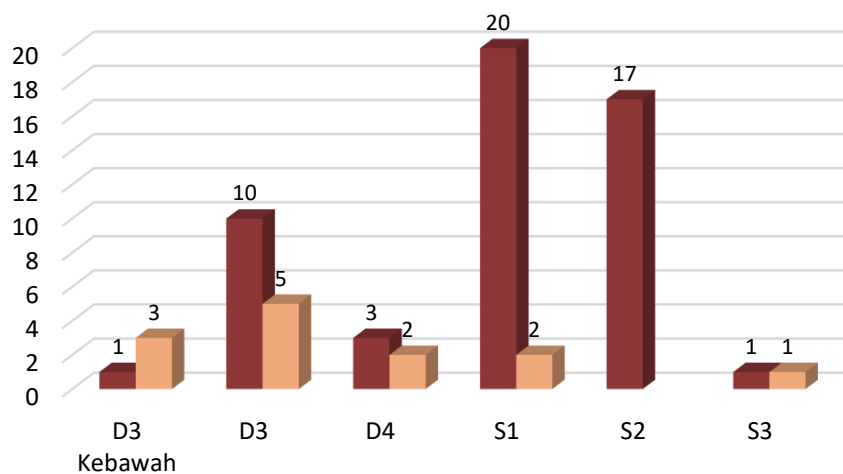
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

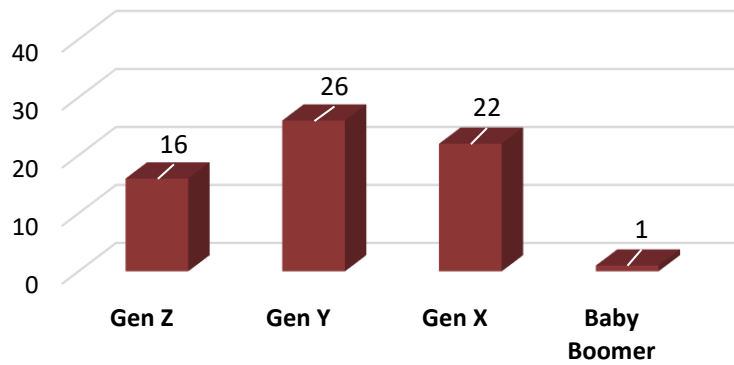
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat DTU memperoleh pendanaan sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Output

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTU berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1. Program Belanja Negara			
a. Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/ Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	721.300.000	718.633.043	99,6%
b. Peraturan terkait Transfer ke Daerah	135.957.000	135.798.245	99,89%
c. Rekomendasi Kebijakan TKD (RM)	237.492.000	235.642.168	99,51%
d. Rekomendasi Kebijakan TKD (Hibah Sinergis)	1.739.042.000	1.397.633.254	80,37%
e. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	323.738.778	305.028.111	94,3%
2. Program Kebijakan Fiskal			
a. RPP DBH Perkebunan Sawit	178.066.000	178.000.825	99,97%
b. PMK Turunan PP Terkait UU HKPD	832.061.000	828.468.787	99,57%
3. Program Pengelolaan Organisasi dan SDM			
a. Dukungan Pelaksanaan ZI WBK pada Direktorat DTU	38.838.000	38.604.433	99,4%
Direktorat DTU	4.527.522.000	3.837.816.866	84,77%

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

2. Dukungan pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024

Tabel 3. Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024

Unit Eselon II	Pagu			Realisasi	
	Awal	Penambahan	Setelah Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal
Direktorat DTU	2.450.592.000	1.739.042.000	4.527.522.000	3.837.816.866	84,77%

Adanya penambahan pagu kegiatan Rekomendasi Kebijakan DAU sebesar 1.739.042.000. Penambahan pagu tersebut berasal dari program Hibah Sinergis Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.



BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) adalah mendukung visi DJPK “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan visi tersebut, Direktorat DTU sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer umum bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer umum yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat DTU mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Dit.DTU mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat DTU mendukung tercapainya tujuan DJPK Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/Kegiatan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program dalam kurun waktu 2020-2024, ketiga program tersebut adalah:

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara
3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Transfer Umum diimplementasikan dalam 4 (empat) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat DTU tahun 2024, telah ditetapkan 7 (Tujuh) sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTU tahun 2024 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DTU Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal
3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	5. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
4.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	6. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah 7. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sumber : Peta Strategi DJPK 2023 dan Renstra DJPK 2020-2024 (diolah)

C. Indikator Kinerja Utama 2024

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTU Tahun 2024



Sumber: Kontrak Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024

Peta Strategi Direktorat DTU Tahun 2024 pada gambar 2.1. menggambarkan posisi 7 Sasaran Strategis didalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTU tahun 2023, terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTU Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 2. Indeks Integritas Organisasi 3. Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	4. Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	5. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD 6. Indeks Ketimpangan Antarwilayah
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	7. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	8. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti 9. Tingkat Kualitas Monitoring DTU 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti
6.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
----	-------------------------------------	--

Perbandingan IKU Direktorat DTU dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU Direktorat DTU dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dalam tabel terlampir:

Tabel 6. Perkembangan IKU Direktorat DTU TA 2021 s.d. TA 2024

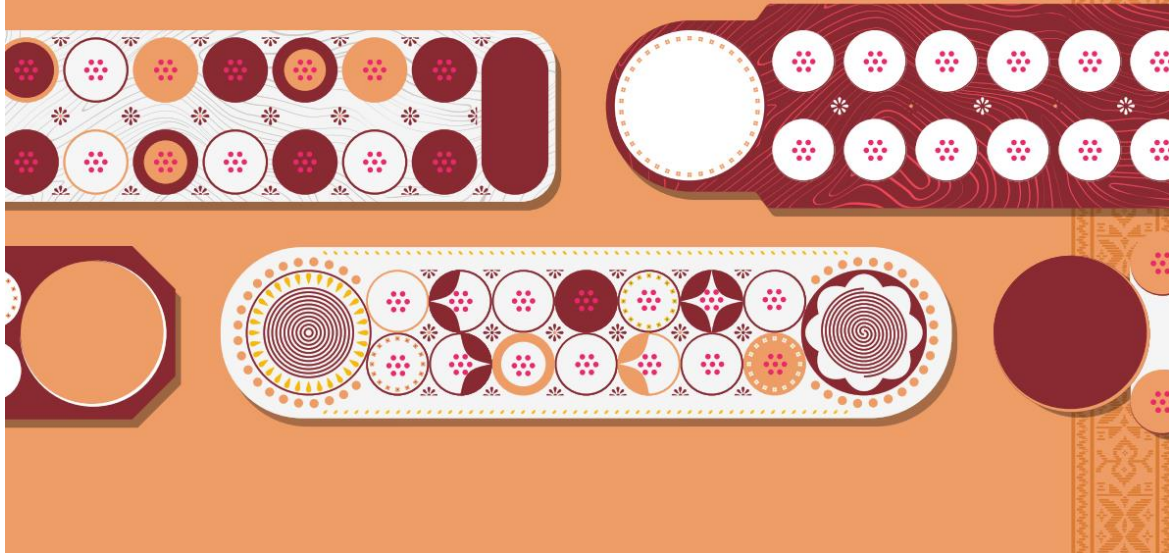
No	IKU Tahun 2022	No	IKU Tahun 2023	No	IKI Tahun 2024
1.	Indeks kualitas belanja negara	1.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	1.	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah
2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah
3.	Indeks integritas	3.	Indeks integritas	3.	Indeks Integritas Organisasi
		4.	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional		
		5.	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara		
4.	Indeks efektivitas kebijakan DTU	6.	Indeks efektivitas kebijakan DTU	4.	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara
5.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	7.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	5.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU
6.	Nilai kinerja regulasi	8.	Nilai kinerja regulasi	6.	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
7.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	9.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah		
8.	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	10.	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7.	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD
9.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	11.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	8.	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti
10.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	12.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	9.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU
				10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti
11.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	13.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	11.	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
		15.	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN		
12.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	16.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	13.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofi inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat DTU tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				106,37
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			106,37
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	84	94,97	113,06
1b – CP	Indeks Integritas Organisasi	100	106,02	106,02
1c – N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4,67	4,77	102,14
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				111,45
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			102,89
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
2a – CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85	87,46	102,89
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat dan Akuntabel			120
3a – CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	13,83%	19,68%	120
3b – CP	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,23	0,143	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				114,14

4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			120
4a – N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	117,20	120
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			113,61
5a – CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74
6b – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	84%	97,3%	115,81
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	120%	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,41
6.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			113,53
6a – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
6b – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	111,12	107,05
7.	Pengelolaan keuangan yang optimal			110,82
7b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	105,83%	110,82
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,25

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTU 2024 (diolah)

Dari 13 (tiga belas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024, Seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,25 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang berkualitas. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, Indeks Integritas Organisasi dan Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 113,06, 106,02 dan 102,14, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 106,37 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel. Sasaran strategis kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan satu IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara dengan target sebesar 85 dan realisasi 87,46 sehingga mendapat indeks capaian 102,89. Sasaran Strategis Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu IKU Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD dengan target 13,83% dan

realisasi 19,68% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 120, serta IKU Indeks Ketimpangan Antarwilayah berhasil mencapai realisasi sebesar 0,143 dari target 0,23, dengan indeks capaian sebesar 120. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 111,45.

Dalam bidang *internal process perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal yang optimal didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 117,2 dari target 95 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120.

Sasaran strategi kedua adalah Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti yang memperoleh realisasi sebesar 91,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 91%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 100,74. IKU Kedua, IKU Tingkat kualitas monitoring DTU dengan target sebesar 84% berhasil mencapai realisasi 97,3% sehingga indeks capaian IKU sebesar 115,81. Serta IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti dengan target sebesar 98% berhasil mencapai realisasi 120% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan bidang *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 114,14.

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.

IKU Pertama yaitu IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120 dengan nilai realisasi capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100. IKU kedua yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan target sebesar 91 berhasil mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 111,12 dengan indeks capaian 107,05.

Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berhasil memenuhi target dengan realisasi capaian sebesar 105,83 dengan indeks capaian 110,82. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *learning and growth perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 115,41 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DTU tahun 2024 sebesar 112,25 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 < x < 120$). Jika dilihat dari nilai NKO Direktorat DTU maka angka capaian NKO Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena didukung dengan

upaya-upaya Direktorat DTU dalam memenuhi target kinerja tahun 2024 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Indeks capaian tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan indeks capaian tahun 2023 yang memperoleh nilai NKO sebesar 112,08.

Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTU Tahun 2019 s.d. 2024



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

1a – CP | Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Indeks kualitas belanja pusat dan daerah merupakan IKU yang salah satu tujuan pengukurannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. Adapun lingkup jenis TKD yang diukur dalam IKU ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dengan objek pengukuran tertentu hanya mencakup DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum.

Komponen perhitungan dalam IKU ini terdiri dari 3 (tiga) variabel utama, yaitu efektivitas dan efisiensi serta nilai NKA PPA BUN, dalam hal ini TKD yang telah disalurkan dan telah dibelanjakan oleh daerah dalam bidang belanja tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Komponen nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari persentase realisasi penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD dan persentase realisasi capaian *output* atas anggaran daerah yang didanai dari DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Sedangkan komponen nilai NKA PPA BUN yang diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum negara (SMART BUN) dengan proporsi komponen pengukuran yaitu: Efektivitas dan Efisiensi (50%) dan Nilai NKA PPA BUN (50%).

Selain mendukung pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu SS “Belanja Negara Yang Berkualitas dan Akuntabel” sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi DJPK Tahun 2024, IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah ini juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Adapun strategi yang dilakukan Dit. DTU dalam mewujudkan pengelolaan belanja pusat dan daerah yang berkualitas adalah:

1. Dari sisi aturan hukum, untuk mendorong tingkat penyaluran DAU TA 2024 dari RKUN ke RKUD, DJPK telah menginisiasi penerbitan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Melalui PMK dimaksud, terdapat sedikit perubahan batasan waktu penyampaian syarat salur DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dari semula untuk tahap III paling lambat di 5 Oktober menjadi 14 November. Dengan pemunduran tanggal penyampaian syarat salur ini diharapkan Pemda memperoleh tambahan waktu sehingga dapat memenuhi syarat realisasi minimal yaitu 75% realisasi belanja atas DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang telah disalurkan pada periode tahap I dan II.
2. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam PMK dimaksud, DJPK telah mengembangkan aplikasi pelaporan syarat salur berbasis web yang dapat diakses secara online oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi SIKD-DAU diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dan lebih cepat menyampaikan syarat salur DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan. Melalui aplikasi dimaksud juga DJPK dapat memantau capaian output dari DAU yang telah dibelanjakan oleh daerah.
3. Secara berkala, selain memberikan informasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah terkait pemenuhan syarat salur, DJPK juga berkolaborasi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah yaitu KPPN dan Kanwil DJPb di daerah untuk mendorong percepatan pemenuhan syarat salur DAU oleh daerah.

Dengan strategi-strategi tersebut tren realisasi penyaluran DAU pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum baik secara triwulanan maupun tahunan 2024 lebih baik dibanding 2023 (yoy).

Formulasi perhitungan indeks kualitas belanja pusat dan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD} \times 50\%) + (\text{Nilai NKA PPA BUN} \times 50\%)$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, di mana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian outcome menunjukkan semakin berkualitasnya belanja negara.

Pengukuran Indeks kualitas belanja pusat dan daerah dimonitor setiap bulan sepanjang tahun serta dilaporkan hasil akhirnya setiap triwulanan tahun 2024 atau sesuai ketentuan dalam KMK 300 tentang Manajemen Kinerja dan Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan, IKU ini memiliki *trajectory target* triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Dengan target IKU sebesar 84 pada tahun 2024, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah sebesar 94,97 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 8, sehingga indeks capaiannya sebesar 113,06 (melampaui target, sebagaimana disajikan dalam tabel 9).

Tabel 8. Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

REALISASI CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS BELANJA PUSAT DAN DAERAH s.d. November	Efektivitas dan Efisiensi		NKA PPA BUN
	DAU		2024
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	
Data Indeks tiap komponen	99.52	94.72	92.82
Rata-rata	97.12		
Realisasi IKU	94.97		

Tabel 9. Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU : 1a – CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84	MAX/TLK
Realisasi	-	28,44	28,44	45,12	45,12	95,23	95,23	
Capaian	-	120	120	120	120	113,37	113,37	

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

DJPk, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah pada direktorat DTU adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Perkembangan IKU indeks kualitas belanja pusat dan daerah Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	80	81	82	83	84
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85	85	86,46	86,5	84
Realisasi	91,18	86,52	87,13	88,42	95,23

Pada tahun 2024, target IKU Indeks Kualitas Belanja pusat dan daerah pada Renstra DJPK 2020-2024 adalah sebesar 84 dan pada tahun 2024 sama dengan target renstra yaitu 84. Adapun realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi IKU yaitu sebesar 88,42 dan realisasi tahun 2024 sebesar 95,23. Meskipun secara spesifik objek pengukuran kualitas belanja terkait DAU antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, dimana mulai tahun 2024 objek pengukurannya adalah DAU yang Ditentukan Penggunaannya di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum di mana porsi alokasinya untuk masing-masing daerah berbeda-beda sesuai kualitas kinerja dalam pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum/infrastruktur. Sebagaimana diketahui pada tahun-tahun sebelumnya objek pengukuran yang dipergunakan adalah porsi belanja wajib dari DTU sebesar 25% dari alokasi masing-masing daerah. Namun demikian, perbedaan objek pengukuran tersebut memiliki arah substansi yang sama yaitu jenis belanja yang sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi capaian dalam periode 5 (lima) tahun tersebut dapat diketahui pula bahwa nilai realisasi Indeks belanja pusat dan daerah tahun 2024 yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks kualitas belanja negara dalam jangka menengah 5 tahunan.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim DAU telah beberapa kali menyelenggarakan Sosialisasi, Rapat Koordinasi serta penyampaian surat kepada pemerintah daerah selama Tahun 2024 antara lain:
 - a. Meyelenggarakan Lokakarya Penguatan Implementasi Regulasi dan Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Makassar pada tanggal 8 Maret 2024;

- b. Mengirimkan Surat Nomor S-67/PK/PK.2/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal: Percepatan Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
 - c. Menyelenggarakan FGD pada tanggal 11 Juni 2024 (sesuai UND-83/PK.2/2024 tanggal 10 Juni 2024) secara online dalam rangka percepatan penyampaian syarat salur dengan mengundang 60 pemerintah daerah yang belum menyampaikan syarat salur DAU SG secara lengkap;
 - d. Menerbitkan surat nomor : S-95/PK/PK.2/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang : Percepatan Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahap II Tahun Anggaran 2024;
 - e. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan Kemendagri untuk ikut mendorong Pemda agar segera menyampaikan syarat salur DAU Tahap II;
2. Melakukan percepatan proses perubahan rencana anggaran (LRA) DAU yang diusulkan oleh Pemda proses verifikasi atas laporan syarat salur yang telah disampaikan oleh Pemda.
 3. Memberikan konsultasi terkait pengelolaan DAU bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum kepada Pemda melalui WA, telepon, dan audiensi baik daring maupun luring.
 4. Dari sisi aturan hukum, untuk mendorong penyaluran DAU TA 2024 DJPK juga telah menginisiasi penerbitan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah

1. Belum semua daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan akhir tahun, hal ini turut dipengaruhi oleh perubahan ketentuan di mana batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan akhir tahun yang semula 14 Januari menjadi 14 Februari 2025 (sesuai PMK 67 Tahun 2024).

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala adalah Monitoring dan Evaluasi Laporan Syarat Salur DAU Specific Grant TA 2024.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi antara Direktorat DTU dengan pemerintah daerah penerima alokasi DAU dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD pengelolaan DAU sepanjang tahun 2024, serta pengoptimalan media komunikasi melalui aplikasi WhatsApp Group khusus per wilayah yang berisi pengelola DAU dari masing-masing daerah di wilayah berkenaan dengan staf Direktorat DTU yang ditugaskan sebagai administrator grup koordinasi tersebut. Langkah optimalisasi sarana

komunikasi digital yang bisa digunakan secara gratis ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien dan berhasil mengurangi pengeluaran anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah ke DJPK hanya untuk berkonsultasi mengenai DAU yang kini bisa dilakukan secara jarak jauh dengan media komunikasi secara daring.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depan berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan pengelolaan DAU di TA 2024, DJPK akan :

- Menyempurnakan pengembangan aplikasi pelaporan syarat salur DAU (SIKD-DAU);
- Meningkatkan sinergi dengan perwakilan kemenkeu di daerah (KPPN dan Kanwil DJPb).

1b – CP | Indeks Integritas Organisasi

Indeks Integritas Organisasi merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan mengukur 2 komponen perhitungan yaitu Survei Penilaian Integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen) dan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM.

Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Formulasi perhitungan indeks integritas organisasi adalah sebagai berikut:

Capaian IKU = Rata-rata Capaian komponen Survei Penilaian Integritas dan Capaian WBK WBBM

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 106,02 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 11. Capaian Indeks integritas Organisasi

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU : 1c – CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP

Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Capaian	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	

Nilai Indeks integritas tiga tahun sebelumnya berturut-turut sebesar 92,20 pada tahun 2020; 91,19 pada tahun 2021; 91,96 pada tahun 2022; dan 95 pada tahun 2023. Namun, hasil indeks integritas ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan metode penghitungan dan penilaian untuk mendapatkan indeks integritas berbeda dan mengacu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan secara historis, capaian IKU Indeks Integritas lima tahun terakhir dengan perbandingannya terhadap target pada Rencana Strategis DJPK adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Kontrak Kinerja	Nilai Indeks Integritas
2020	90	90	92,20
2021	90,5	90,16	91,91
2022	91	90,66	91,96
2023	91,5	91,16	95
2024	92	100	106,02

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah KPK tidak merilis daftar responden yang di-blast tautan survei, yang sudah mengisi dan yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei.

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Penandatanganan pakta integritas oleh Direktur DTU pada 31 Januari 2024;
2. Identifikasi titik rawan gratifikasi oleh Direktorat DTU pada Februari 2024;
3. Pengisian Deklarasi Benturan Kepentingan oleh seluruh pegawai Direktorat Dana Transfer Umum;
4. Mengikutseratakan pegawai Direktorat DTU pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;
5. Pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Dit. DTU pada tanggal 6 s.d. 13 Maret 2023;
6. Pelaksanaan THM Dit. DTU dengan tema “Penguatan Integritas melalui Pemahaman Kembali tentang Gratifikasi” pada 8 Maret 2024;
7. Sosialisasi Anti Korupsi “Penguatan Lini Pertama dan Budaya Integritas” bagi seluruh pegawai Dit. DTU pada tanggal 23 Mei 2023;

8. Pelaksanaan KLIN-WATAS yang merupakan sarana dan inovasi terkait ngobrol anti korupsi dan pengenalan seputar anti korupsi kepada pegawai di lingkungan DJPK dan Kemenkeu pada setiap triwulan 2024;
9. *capacity building* DTU dengan mengangkat materi terkait penguatan integritas melalui peran lini pertama dan “antikorupsi di masa genting”;
10. FGD Internalisasi Penguatan Integritas dan Antikorupsi oleh masing-masing Eselon III/Ketua Tim Reguler pada Agustus 2024;
11. Dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengatasi isu perubahan iklim, Direktorat DTU mengusung program eco-office melalui penyediaan totebag pada area sekitar lift untuk mengurangi penggunaan plastik.
12. Kebijakan Dana Alokasi Umum untuk mendukung sasaran prioritas nasional, salah satunya penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting;
13. Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam proses pengiriman link dan monitoring pengisian survei SPI Tahun 2024.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2024 antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat DTU;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI.

3c – N | Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU

Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur dan mendorong tingkat kepuasan publik terhadap layanan Direktorat Dana Transfer Umum. Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat DTU dalam memenuhi harapan para pengguna layanan/*stakeholders*. Guna mengukur sejauh mana tingkat kepuasan publik atas layanan yang telah diberikan oleh Direktorat DTU tersebut dilakukan melalui metode survey.

Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus (*continuous improvement*) dilakukan kepada pengguna layanan dalam hal ini pemerintah daerah yang merupakan bagian dari *stakeholders* Direktorat Dana Transfer Umum.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Organisasi dan SDM yang optimal. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Belanja negara yang berkualitas.

Berikut formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU}}{n}$$

Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei adalah sebesar 4,75 sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 102,15. Capaian IKU Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 13. Hasil survey indeks kepuasan publik atas layanan DTU

NO	LAYANAN DTU	NILAI (SKALA 5)
1.	Persyaratan dan Penyaluran DAU	4,74
2.	Pengelolaan DBH DR	4,71
3.	Pengelolaan dan Persyaratan Penyaluran DBH Non SDA	4,71
4.	Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH Melalui TDF	4,88
REALISASI DIREKTORAT DTU		4,75
TARGET		4,67
INDEKS CAPAIAN IKU		101,71

Beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari survei adalah:

1. Memastikan informasi terkait kegiatan pembahasan DBH DR:
 - a. Dapat meningkatkan pemahaman tentang DBH DR.
 - b. kegiatan Pembahasan RKP DBH SDA Dana Reboisasi penting bagi daerah.
 - c. Kebutuhan/informasi substantif yang diperlukan terpenuhi sesuai harapan pengguna layanan.
 - d. Pembahasan DBH DR yang dilakukan secara luring (offline) berlangsung secara efektif.
 - e. Kepuasan para pengguna layanan atas layanan dan fasilitasi yang DJPK berikan selama kegiatan.
 - f. bahwa seluruh layanan yang DJPK berikan tidak dipungut biaya, dan tidak ada pungutan liar atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai DJPK.

2. Memastikan kualitas penyampaian mengenai:
 - a. Ketentuan/informasi persyaratan penyaluran DAU
 - b. Layanan verifikasi syarat penyaluran DAU
 - c. Layanan informasi terkait penyaluran, penundaan dan pemotongan DAU
 - d. Layanan informasi atas ketentuan/peraturan pengalokasian DAU
 - e. Layanan Informasi dan transparansi atas perhitungan/penetapan besaran alokasi DAU.
2. Memastikan terkait layanan Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF:
 - a. Daerah telah memahami dan mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait tata cara penetapan, tata cara penarikan, proses penetapan dan kebijakan TDF.
 - b. Daerah telah memahami dan mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait tata cara penetapan dan proses penghitungan remunerasi TDF
 - c. Kementerian Keuangan telah transparan terkait tata cara penetapan dan penghitungan remunerasi TDF
 - d. Penilaian daerah terhadap kecepatan respon pegawai, kerjasama dan permintaan audiensi/konsultasi yang diberikan pegawai dalam menanggapi permintaan penarikan TDF

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, dimana Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU diharapkan mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 4,67 skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Tabel 14. Capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU

K-Two Dit.DTU	SS: 3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	IKU : 3b – N Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	MAX/TLK
Realisasi	4,77	4,77	4,77	4,78	4,77	4,75	4,77	
Capaian	102,14	102,14	102,14	102,36	102,14	102,15	102,15	

IKU Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2015-2019, sedangkan sejak tahun 2020 survei layanan dilaksanakan secara swakelola dan terpadu oleh Direktorat Dana Transfer Umum dengan IKU Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU dan tidak tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2020-2024.

Capaian nilai indeks kepuasan publik atas layanan Dit.DTU tahun 2024 meningkat dari capaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 dengan target IKU sebesar 4,67 berhasil memperoleh

capaian sebesar 4,77. Gambaran realisasi dan target IKU Indeks Kepuasan Publik tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 15 Perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2019-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	4,63	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	4,50	4,60	4,65	4,65	4,67
Realisasi	4,64	4,63	4,69	4,75	4,77

Adapun perbandingan nilai dari setiap aspek layanan yang disurvei dari tahun 2019 ke tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Nilai Setiap Aspek Layanan yang Disurvei (2019-2024)

NO	JENIS LAYANAN 2020	INDEKS	JENIS LAYANAN 2021	INDEKS	JENIS LAYANAN 2022	INDEKS	JENIS LAYANAN 2023	INDEKS	JENIS LAYANAN 2024	INDEKS
1.	Layanan Pengelolaan DBH Migas dan Minerba	4,52	Persyaratan Penyaluran DBH DR	4,6	Persyaratan Penyaluran DBH DR	4,64	Pengelolaan DBH DR	4,73	Pengelolaan DBH DR	4,71
2.	Layanan Persyaratan Penyaluran DAU Tambahan dan Alokasi DAU	4,68	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,68	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,65	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,72	Persyaratan Penyaluran dan Alokasi DAU	4,74
3.							Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF	4,8	Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF	4,88

Dalam rangka pencapaian kinerja telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Menentukan responden sasaran survei;
2. Menentukan jenis layanan yang akan disurvei;
3. Telah dilakukan Memo Reminder via *whatsapp* kepada daerah untuk melakukan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR Semester 2 TA 2024 dan Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR Semester 1 TA 2024 agar tepat waktu;
4. Menyusun draft kuesioner yang akan diberikan saat survei dilaksanakan dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada stakeholder.
5. Menyiapkan media/sarana untuk penyampaian survei yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU yang melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan/sosialisasi/bimbingan teknis dengan pemerintah daerah penerima alokasi DBH SDA Kehutanan terkait Penggunaan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi pada 26 September 2024.
2. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim DAU menyelenggarakan Sosialisasi PMK 110 dan PMK 143 pada 21 Maret 2024.
3. Melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Penarikan TDF Tahun 2024 pada 4 Juni 2024.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi peningkatan Kualitas Penggunaan DBH Earmarked (DBH Sawit) pada 11 Juni 2024.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi, dalam pencapaian kinerja Indeks kepuasan publik atas layanan DTU ini, telah dilakukan efisiensi berupa:

1. Pelaksanaan survei secara daring kepada stakeholder. Dalam pelaksanaan survey yang memanfaatkan media daring dimaksud tentunya mempermudah dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga lebih hemat waktu, tenaga dan biaya serta lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional.
2. Penyampaian survey kepada pemerintah daerah dilakukan langsung setelah pemberian layanan selesai dilakukan, tujuannya agar pemerintah daerah tidak bias dalam memberikan penilaian.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Direktorat DTU ke depan antara lain melakukan sosialisasi terkait kebijakan Pengelolaan DAU dan BDH, agar seluruh pemerintah daerah mendapatkan informasi kebijakan pengelolaan DAU dan DBH. Untuk sosialisasi dapat dilakukan secara daring dengan mengundang seluruh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dengan semakin berkembangnya teknologi, Direktorat DTU akan terus berupaya untuk menerapkan cara-cara baru yang lebih efisien dalam melakukan pelayanan kepada stakeholder.

2a – CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

IKU ini mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas prioritas di APBN (minimal 3 bidang: penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi). IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, IKU Efektivitas Kebijakan Belanja Negara menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif. Pada Peta Strategi tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategi Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin efektif dampak kebijakan belanja yang dikeluarkan. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks menunjukkan semakin tidak efektif kebijakan belanja yang dikeluarkan. Pengukuran efektivitas kebijakan belanja negara menghitung komponen pertama yaitu capaian Output dan Anggaran (Penurunan Stunting, Penurunan Kemiskinan Ekstrem, dan Capaian Peningkatan Investasi) serta komponen kedua Capaian outcome (Indeks Pembangunan Manusia). Perhitungan IKU indeks kebijakan belanja negara dilaksanakan oleh BKF.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara dilaporkan pada setiap triwulan tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode *Take Last Known value* (angka yang digunakan adalah angka periode terakhir). Pada tahun 2024, IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 87,46 dari target 85 dalam kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan belanja negara adalah 102,89.

Tabel 17. Capaian indeks efektivitas kebijakan DTU

K-Two Dit.DTU	SS: 2. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif							
	IKU : 2b – N Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	85	85	85	85	85	85	MAX/TLK
Realisasi	-	98,83	98,83	93,13	93,13	87,46	87,46	
Capaian	-	116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	

Perhitungan capaian sebesar 87,46 tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 18. Penghitungan capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan Belanja Negara

Komponen	Realisasi	Indeksasi	Capaian
Komponen 1			
Capaian Penurunan Stunting	92,9%	85	78,97
Capaian Penurunan Kemiskinan Ekstrem	122,5%	85	104,13
Capaian Peningkatan Investasi	99,41%	85	84,5
Rata-rata Komponen 1		89.19	
Komponen 2			
Indeks Pembangunan Manusia	75,02 (Target 74,39) = 100,8%	85	85,72
Rata-rata komponen 2		85,72	
Capaian Triwulan IV		87,46	

Adapun peran Direktorat DTU dalam capaian penurunan stunting di antaranya adalah melalui pengalokasian DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Kesehatan, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024. Di mana melalui alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (PMK 110/2023) pemerintah daerah penerima alokasi diberikan daftar subkegiatan yang dapat dipilih untuk didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Selanjutnya dari total 1651 subkegiatan dalam PMK 110/2023 dimaksud, 237 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun di bidang pekerjaan umum.

Tabel 19. Daftar Subkegiatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Bidang DAU SG	Total Subkegiatan Dalam PMK 110 Tahun 2023	Total Subkegiatan dengan Tagging Mendukung Penurunan Stunting
Bidang Kesehatan	291	121
Bidang Pendidikan	977	45
Bidang Pekerjaan Umum	383	71
Total	1651	237

Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2024 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2024, terdapat 22,67% dari total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU Yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang merupakan subkegiatan dengan tagging pendukung penurunan stunting (Rp15.144.544.617.312,00 dari Rp 66.795.388.685.000,00). Selanjutnya dari 51 daerah yang telah menyampaikan laporan realisasi akhir tahun 2024 (per Januari 2025 belum semua daerah menyampaikan karena berdasarkan ketentuan laporan realisasi anggaran dimaksud paling lambat disampaikan 14 Februari 2025) diperoleh informasi bahwa dari total anggaran subkegiatan tagging penurunan stunting sebesar Rp15.144.544.617.312,00 yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum tahun 2024 tersebut telah terealisasi Rp 8.878.076.494.304,00 atau persentase realisasi mencapai 58,62%.

Tabel 20. Data Subkegiatan tagging penurunan stunting

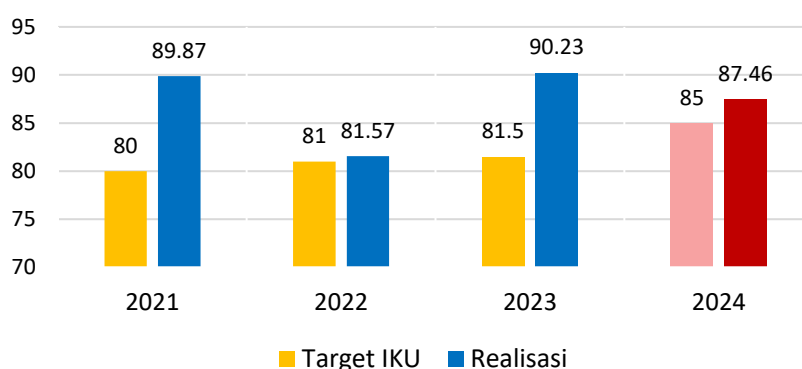
Subkegiatan tagging penurunan stunting	Alokasi dalam DAU 2024	Anggaran Stunting s.d. Des	% Anggaran	Realisasi s.d. Des	% Realisasi
DAU bidang Pendidikan	Rp 37.470.690.538.000	Rp 576.870.565.582	1,54%	Rp 442.494.655.653	76,71%
DAU bidang Kesehatan	Rp 17.141.720.743.000	Rp 594.983.748.463	3,47%	Rp 548.754.629.174	92,23%
DAU bidang Pekerjaan Umum	Rp 12.182.977.404.000	Rp 577.761.777.637	4,74%	Rp 546.213.934.409	94,54%
Total	Rp 66.795.388.685.000	Rp 15.144.544.617.312	22,67%	Rp 8.878.076.494.304	58,62

Sumber: <https://sikd.kemenkeu.go.id/dau/>

Data tersebut hanya sebagian anggaran penurunan stunting yang teridentifikasi dari sumber pendanaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Secara keseluruhan anggaran penurunan stunting pada APBD dapat didanai dari sumber-sumber pendanaan lain seperti PAD, ataupun jenis Transfer Ke Daerah lainnya. Namun demikian sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 19, dari sisi outputnya, belanja negara tahun 2024 telah berhasil mencapai 92,9% dari target penurunan stunting di tahun 2024.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara sebelumnya Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja DTU ini mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahu 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU sebesar 80 dengan realisasi 89,87. tahun 2022 target ditetapkan sebesar 81 dengan capaian realisasi 81,57, kemudian pada tahun 2023 dengan target 81,5 dan realisasi 90,23. Gambaran realisasi dan target IKU Indeks Efektivitas Kebijakan DTU tahun 2021-2024 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 7. Perbandingan target dan realisasi indeks Kebijakan DTU tahun 2021-2023 dan Indeks Kebijakan Belanja Negara tahun 2024



Keberhasilan pencapaian indeks efektivitas kebijakan Belanja Negara ini dapat melampaui target yang ditetapkan didukung oleh pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis yang efektif dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait kebijakan DTU.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah:

1. Sesuai ketentuan, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk memilih subkegiatan yang terdapat dalam PMK 110 Tahun 2023 untuk didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Sementara dari 1651 daftar subkegiatan yang tersedia dalam PMK 110 Tahun 2023 hanya 237 saja yang merupakan subkegiatan dengan *tagging* penurunan stunting. Dengan demikian tingkat kendali atas pencapaian IKI ini cenderung rendah (tidak dapat memaksa daerah untuk meningkatkan porsi anggaran stunting dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya).
2. Belum semua daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan akhir tahun, hal ini turut dipengaruhi oleh perubahan ketentuan di mana batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan akhir tahun yang semula 14 Januari menjadi 14 Februari 2025 (sesuai PMK 67 Tahun 2024).

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depan berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan pengelolaan DAU di TA 2024, DJPK akan :

- Menyempurnakan pengembangan aplikasi pelaporan syarat salur DAU (SIKD-DAU);
- Meningkatkan sinergi dengan perwakilan kemenkeu di daerah (KPPN dan Kanwil DJPb).

3a – CP | Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD

Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD merupakan TKD yang dialokasikan dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah yang terdiri atas jenis dana DBH berdasarkan kinerja Pemda sesuai ketentuan Pasal 120 UU HKPD.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat.

IKU ini mengukur jumlah rasio alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKDD untuk mendukung rasio TKD berbasis kinerja.

Berikut formulasi IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD:

$$\text{Perhitungan} = \left[\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right]$$

IKU ini memiliki target pada tahun 2024 sebesar 13,83 % dan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value*. Realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 13,83%. Adapun penghitungan IKU dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 21. Penghitungan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD

No	Uraian	Perpres 76/2023	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2024
1	DBH SDA	8.251.034.754.800,-	8.243.705.331.322,-
2	DBH Non SDA	5.471.418.140.700,-	52.311.749.097.995,-
3	DAU	201.905.001.259.000,-	68.122.984.619.475,-
	Jumlah	215.627.454.154.500,-	128.678.439.048.792 ,-
	Total TKD	874.875.475.600.000,-	

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} &= \left[\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] \\ &= \left[\frac{215,6}{874,87} \times 50\% \right] + \left[\frac{128,7}{874,87} \times 50\% \right] \\ &= [12,32\%] + [7,36\%] \\ &= \mathbf{19,68\%} \end{aligned}$$

Capaian nilai Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 19,68% sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 120.

Tabel 22. Capaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

SS: 5. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat	
---	--

K-One DJPk	IKU : 5a – CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	4,53%	6,33%	6,33%	10,34%	10,34%	13,83%	13,83%	MAX/TLK
Realisasi	13,02%	9,30%	9,30%	14,88%	14,88%	19,68%	19,68%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah sebesar 25,94% dengan realisasi sebesar 26,18. Kemudian target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 28,94 dengan capaian realisasi 29,05. Kemudian pada tahun 2023 target ditetapkan Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja terhadap TKDD dalam renstra pada tahun 2021 adalah sebesar 25,94% kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 28,94%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja lebih rendah dari nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Hal tersebut dikarenakan target pada kontrak kinerja DTU hanya memperhitungan alokasi TKD dari jenis Dana di Direktorat Dana Transfer Umum. Nilai Realisasi Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD tahun 2024 yang lebih rendah dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD dalam jangka menengah 5 tahunan.

IKU Rasio TKD yang Berbasis kinerja terhadap TKD apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio TKD Berbasis Kinerja Terhadap TKD Tahun 2019-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	
Renja DJPK	-	-	-	-	
Standar nasional	-	-	-	-	
Target pada Kontrak Kinerja	-	25,94%	28,94%	2,7%	13,83%
Realisasi	-	26,18%	29,05%	3,45%	19,68%

IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang masuk dalam sasaran indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Selain itu, Kebijakan Transfer ke Daerah (DAU dan DBH) untuk mendukung ekonomi hijau antara lain: (a) pengalokasian DBH SDA dengan memperhitungkan alokasi kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH); (b) pengalokasian dau dengan memperhitungkan variabel faktor penyesuaian di mana salah satunya berupa afirmasi alokasi untuk daerah-daerah yang memiliki konservasi hutan; (c) DBH Kehutanan Dana Reboisasi dan DBH Perkebunan Sawit yang penggunaannya ditentukan untuk mendukung program kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini antara lain menyampaikan reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu:

1. Terdapat daerah yang belum dilakukan penyaluran DBH berbasis kinerja sampai Desember 2024 karena daerah tersebut belum menyampaikan laporan syarat salur kinerja.
2. Beberapa daerah membutuhkan perubahan/revisi anggaran terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan laporan realisasi yang menjadi syarat salur DAU.

Pengalokasian TKD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

Selanjutnya, Rencana aksi yang akan dilakukan Direktorat Dana Transfer Umum yaitu:

1. Penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif melalui grup koordinasi, surat, bimbingan teknis, sosialisasi, pada setiap kesempatan.
2. Melakukan rekonsiliasi laporan realisasi DBH DR dan rekomendasi penyaluran DBH SDA berbasis kinerja pada bulan Maret dan Triwulan II
3. Melakukan koordinasi dengan tim Otsus terkait penyampaian laporan penggunaan Tambahan DBH Mingas Otsus.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran DAU TA 2024.

3b – CP | Indeks Ketimpangan Antarwilayah

Indeks Ketimpangan Antarwilayah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum, dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Indeks Ketimpangan Antarwilayah menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Belanja Negara yang Berkualitas.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks Theil. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah.

Keunggulan indeks ini adalah dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Selain itu indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang memadai dalam perumusan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks Theil adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Dimana :

y_i = Pendapatan daerah dalam APBD perkapita di daerah i

$\bar{y}$ = Rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah, yaitu

$$\ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) = \text{Logaritma natural dari } \frac{y_i}{\bar{y}} \quad \frac{(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_i)}{n}$$

n = Jumlah daerah

Besarnya adalah $0 < \text{Indeks Ketimpangan Antarwilayah} < 1$

Jika nilai indeks mendekati 1 berarti mendekati sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti merata.

Pendapatan daerah dalam APBD = PAD tahun (n-2) + DBH Pajak tahun (n-2) + DBH SDA tahun (n-2) + DAU tahun (n)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin kecil nilai Indeks Theil atau mendekati 0 (nol) menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketimpangan antar daerah yang berarti tingkat pemerataan kemampuan pembangunan daerah semakin baik. Sebaliknya semakin besar nilai Indeks Theil maka semakin besar pula ketimpangan yang ada.

Capaian IKU Indeks ketimpangan antarwilayah dilaporkan pada triwulan IV tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Pada tahun 2024, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 0,143 dari target 0,230 dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan Indeks Theil sebesar 0,143 tersebut dapat diartikan pula bahwa formulasi perhitungan alokasi DAU untuk tahun 2024 telah cukup efektif menurunkan angka ketimpangan fiskal antar daerah secara nasional yaitu dari semula 0,272 sebelum adanya atau tanpa dialokasikannya DAU menjadi 0,143 setelah DAU dialokasikan ke setiap daerah. Berdasarkan Indeks Theil dimaksud, capaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah TA 2024 adalah 120.

Tabel 24. Capaian indeks ketimpangan antarwilayah

K-One DJPk	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU: 1b – CP Indeks ketimpangan antarwilayah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	0,230	0,230	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	0,143	0,143	
Capaian	-	-	-	-	-	120	120	

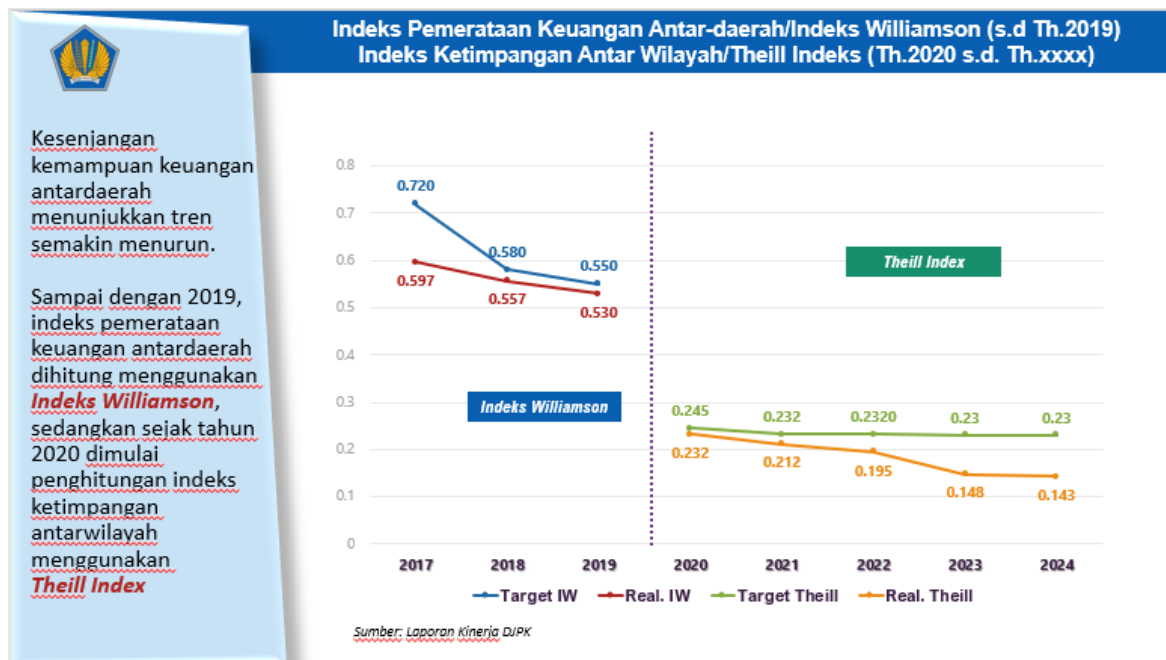
Perhitungan capaian sebesar 0,143 tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 25. Data Penghitungan Indeks Theil

DAU 2025	DAU 2024 Rp 427.699,30 M		DAU 2025 Rp 446.633,81 M	
	Prov.	Kab/Kota	Prov.	Kab/Kota
ALOKASI DAU				
PROPORSI	14,10%	85,90%	14,10%	85,90%
PAGU DAU	60.305,60	367.393,70	62.975,37	383.658,45
HASIL (TANPA DAU)				
THEIL INDEX (AVG)	0,26226		0,27233	
THEIL INDEX (WEIGHTED)	0,21344		0,22857	
TI	0,13036	0,39417	0,15417	0,39049
HASIL (DENGAN ADANYA DAU)				
THEIL INDEX (AVG)	0,17653		0,16731	
THEIL INDEX (WEIGHTED)	0,14817		0,14257	
TI	0,09992	0,25315	0,10050	0,23412

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Ketimpangan Wilayah ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 0,245 dengan realisasi sebesar 0,232, Tahun 2021 dari target 0,232 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,212, tahun 2022 dengan target 0,232 dengan capaian realisasi 0,195, tahun 2023 dengan target 0,230 realisasi sebesar 0,148, serta tahun 2024 dengan target 0,230 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,143.

Grafik 8. Perbandingan target dan realisasi indeks ketimpangan antar wilayah



Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Indeks Ketimpangan Antarwilayah dalam renstra pada tahun 2020-2024 adalah sebesar 0,245, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,242, tahun 2022 sebesar 0,240. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 0,235, serta tahun 2024 menjadi 0,230.

Tabel 26 Perbandingan target dan realisasi dari tahun 2019-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,245	0,242	0,240	0,235	0,232
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	0,240		
Renja DJPK tahun 2023	-	-	0,240		0,232
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	0,245	0,232	0,232	0,230	0,230
Realisasi	0,232	0,212	0,195	0,148	0,143

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks Theil tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja lebih rendah dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja. Nilai Indeks Theil tahun 2024 yang lebih kecil dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian tingkat ketimpangan antarwilayah dalam jangka menengah 5 tahunan.

Faktor yang mendukung Keberhasilan pencapaian Indeks Ketimpangan Antarwilayah di antaranya disebabkan:

1. pada tanggal 19 September 2024, telah ditetapkan hasil perhitungan alokasi DAU TA 2025 dengan total pagu alokasi sebesar Rp446,63 Triliun atau naik sebesar 4,43% dari pagu alokasi DAU TA 2024 Rp427,69 Triliun.
2. Kebijakan *hold harmless* selama 5 tahun sejak UU HKPD diberlakukan atau mulai TA 2023 s.d. TA 2027 di mana besaran alokasi DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan minimal sama dengan alokasi masing-masing daerah pada tahun sebelumnya cukup berpengaruh terhadap sebaran alokasi DAU dengan ketimpangan antarwilayah yang cukup baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJPK sepanjang tahun 2024 dalam meraih capaian realisasi IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui target baik target tahunan (dalam Kontrak Kinerja) maupun target jangka menengah (Renstra) antara lain:

1. Melakukan simulasi perhitungan alokasi DAU TA 2025;
2. Menerbitkan KMK nomor 21/KMK.7/2024 tentang penetapan bobot dan presentase yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2025;
3. Mengupload hasil perhitungan alokasi DAU TA 2025 yang telah disepakati oleh Panja TKD 2024 melalui website resmi DJPK;
4. Menyiapkan lampiran Perpres tentang rincian APBN 2025;
5. Bersinergi dengan penyedia data (internal maupun eksternal), sehingga data dari penyedia dapat diterima tepat waktu dan bersifat valid;
6. Melaksanakan proses pengolahan data, perencanaan, dan pengalokasian sesuai dengan batas waktu (*timeline*) yang ditentukan; dan

7. Mengoptimalkan pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini antara lain :

1. Alokasi TA 2025 harus mempertahankan alokasi minimal tiap daerah sebesar alokasi tahun sebelumnya (2024) ditambah dengan adanya masa transisi pemerintahan baru yang mana tentu akan berbeda kebijakan prioritas nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk di satu sisi menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai belanja pemerintahannya, di sisi lain tetap mengupayakan pemerataan dengan menurunkan angka Indeks Ketimpangan Antarwilayah (indeks Theil) dengan alokasi DAU yang diberikan.
2. Proses simulasi membutuhkan banyak opsi alternatif skema perhitungan dengan banyak pertimbangan antara lain:
 - a. kebutuhan untuk menjaga jumlah alokasi DAU 2025 agar tidak kurang dari alokasi tahun 2024 (kebijakan hold harmless sesuai UU HKPD).
 - b. arah kebijakan DAU 2025 terkait DAU specific grant yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan layanan dasar di daerah.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya; dan
2. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Keberhasilan pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang di tahun yang akan datang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2026;
2. Mempersiapkan konsep sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah.

4a – CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan RPKM/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPKM/RKMK tahun bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan RPKM dan RKMK yang bersifat kebijakan.

Proses Penyusunan RPKM dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024 terdiri dari RPKM/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2024, RPKM/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPKM/RKMK di luar Program Perencanaan dan Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Nilai Kinerja Regulasi Prioritas menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal.

Daftar RPKM/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPKM/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2024, RPKM/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPKM yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. RPKM/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPKM/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

Selama tahun 2024, Direktorat Dana Transfer Umum telah menyelesaikan 16 (enam belas) PMK/KMK yang menjadi dasar perhitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi Tahun 2023 yaitu terdiri dari 4 PMK Program Perencanaan dan 12 PMK/KMK Kumulatif Terbuka. Selanjutnya, pengukuran capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi atas penyelesaian RPKM/RKMK tersebut dilakukan dengan menilai beberapa variable yang terdiri dari tingkat penyelesaian, ketepatan waktu penyelesaian, dan simplifikasi regulasi yang dilakukan, baik simplifikasi jumlah (PMK yang dicabut) maupun simplifikasi proses bisnis yang dilakukan.

Rincian PMK/KMK yang telah diselesaikan Direktorat Dana Transfer Umum pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 27. Daftar PMK Perencanaan ditetapkan tahun 2024

NO	RPKM PROGRAM PERENCANAAN	TARGET	TAHAPAN (SELESAI)	
			NOMOR	TANGGAL

1.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Oktober	PMK 67/2024	24 September 2024
2.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility	Maret	PMK 16/2024	20 Maret 2024
3.	Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	September	PMK 56/2024	22 Agustus 2024
4.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya	Desember	PMK 102/2024	13 Desember 2024

Tabel 28. Daftar PMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2024

NO	PMK KUMULATIF TERBUKA	STATUS	
		NOMOR	TANGGAL
1.	RPMK tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	55 Tahun 2024	21 Agustus 2024
2.	RPMK tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024	89 Tahun 2024	25 Oktober 2024
3.	RPMK Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	72 Tahun 2024	10 Oktober 2024
4.	RPMK tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	6 Tahun 2024	31 Januari 2024

Tabel 29. Daftar KMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2024

NO	KMK KUMULATIF TERBUKA	STATUS	
		NOMOR	TANGGAL
1.	RKMK tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Rincian Pagu Bagian Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah per Daerah dan Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan per Daerah Tahun Anggaran 2024	230 Tahun 2024	28 Mei 2024
2.	RKMK tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024	267 Tahun 2024	6 Juni 2024
3.	Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2024	164 Tahun 2024	22 Maret 2024
4.	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024	173 Tahun 2024	16 November 2024

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known value* (TLK). Sampai dengan akhir tahun 2024, dari target sebesar 95 diperoleh realisasi 117,2 sehingga diperoleh indeks capaian IKU sebesar 120 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 30. Capaian IKU nilai kinerja regulasi

K-Two Dit.DTU	SS : 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4a – N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	40	60	60	80	80	95	95	MAX/TLK
Realisasi	115,2	113,8	113,8	113,7	113,7	117,2	117,2	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perhitungan capaian sebesar 103,92 tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 31. Penghitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi

NO	KOMPONEN	Capaian
A	RUU	
	Total Indeks	0.0
	Jumlah RUU	0.0
	Nilai Komponen A	0.0
B	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks	0.0
	Jumlah RPP/RPERPRES	0.0
	Nilai Komponen B	0.0
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	1440.0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	12.0
	Rata-rata Nilai Progress	120.0
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	1400.0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	12.0
	Rata-rata Nilai MP	116.7
	Nilai Formil	118.3
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	120.0

	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	1.0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	120.0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1310.0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	11.0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	119.1
	Nilai Simplifikasi Regulasi	119.5
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0.0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	12.0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0.0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120.0
	Nilai Materil	119.7
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	1200.0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan	12.0
	Nilai Ketepatan Waktu	100.0
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	440.0
	Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	4.0
	Nilai Perubahan Waktu	110.0
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	102.0
	Nilai RPMK/RKMK Kebijakan	117.2
	REALISASI (Target 95)	117,2
85%	CAPAIAN Q4 (Target 85%)	120

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Nilai Kinerja Regulasi ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah sebesar 85 dengan realisasi sebesar 104,2 dan target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sama sebesar 85 dengan capaian realisasi 96,83, 2023 target IKU ditetapkan sebesar 85 dengan capaian Realisasi 103,94, serta tahun 2024 target IKU sebesar 95 dengan capaian realisasi 117,2.

Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32. Perkembangan IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	85	85	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	85	85	85	95
Realisasi	-	104,2	96,83	103,92	117,2

Adapun beberapa strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pendataan rencana rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2024;
2. Monitoring dan evaluasi penyusunan RPKM/RKMK;
3. Harmonisasi rancangan PMK/KMK dengan regulasi terkait;
4. Simplifikasi regulasi berupa pencabutan dan perbaikan proses bisnis dalam penyusunan RPKM.

5a – CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2024. DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen. Dalam hal PTL tidak diterima

Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan triwulanan, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Perhitungan IKU didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Triwulan I s.d III} = \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Triwulan IV} = \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024+Jml rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds PTL atau BA pembahasan+yg diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024+Jml rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023}} \times 50\% \right)$$

Target IKU ini pada 2024 adalah 91% dengan capaian sebesar 91,67% dan periode pelaporan Triwulanan. Target tahun 2024 tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 (90%). IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-13/PB/2024 Tanggal 9 Januari 2024 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2024 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 33. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian Triwulan IV 2024
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i=g+h)	(j)	(k=j/i)	(l=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal	9	-	9	9	100.00%	2	-	2	2	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	29	17	46	43	93.48%	62	23	85	78	91.76%	92.62%
Direktorat Jenderal Pajak	28	6	34	34	100.00%	7	2	9	9	100.00%	100.00%
Direktorat Bea Cukai	2	-	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	44	15	59	55	93.22%	72	18	90	90	100.00%	96.61%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	37	2	39	39	100.00%	93	8	101	96	95.05%	97.52%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	39	9	48	46	95.83%	91.67%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5	2	7	7	100.00%	16	5	21	20	95.24%	97.62%
Inspektorat Jenderal	1	1	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
BKF	-	1	1	1	100.00%	-	1	1	1	100.00%	100.00%

Dari data tersebut, maka diperoleh realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti sebesar 91,67% $((87,5\% * 50\%) + (95,83\% * 50\%))$. Dengan indeks capaian sebesar 100,74, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 91% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 34. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K-One DJPK	SS: 5. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	5a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	MAX/TLK
Realisasi	10%	64,1%	64,1%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	100	120	120	120	120	100,74	100,74	

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	100%	89,5%	95,71%	89,5%	97,22%	90%	96,16 %	91%	91,67%

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip good governance tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan dokumen terkait dengan pemeriksaan serta memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa (BPK);

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi internal DJPK untuk tindak lanjut rekomendasi temuan BPK.
2. Berkoordinasi dengan Dit. APK terkait capaian IKU.

5b – N | Tingkat Kualitas Monitoring DTU

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi penggunaan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mematuhi *mandatory spending* dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan dan monitoring. Komponen yang diukur dari IKU ini yaitu:

1. Persentase jumlah daerah yang mengalokasikan DAU SG sesuai alokasi yang ditetapkan.
2. Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH DR, DBH Otsus Migas.
3. Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT dan DBH Sawit.
4. Presentase Jumlah Daerah yang mengalokasikan TDF sesuai PMK TDF.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir).

Berikut formulasi perhitungan IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU:

$$\frac{\text{Monitoring (DAU SG + DBH CHT + DBH SAWIT + DBH DR + DBH OTSUS MIGAS + TDF)}}{6}$$

DAU = Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan syarat salur DAU SG

DBH = Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT, DBH Sawit, DBH DR, DBH OTSUS MIGAS

TDF = Persentase jumlah daerah yang mengalokasikan TDF sesuai PMK TDF

Realisasi

Perhitungan Realisasi Capaian IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU	Tingkat Kualitas Monitoring			
	DAU	DBH SDA	DBH Non SDA	TDF
	(Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan Syarat Salur DAU SG)	(Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH DR, DBH Otsus Migas)	(Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT dan DBH Sawit)	(Presentase Jumlah Daerah yang mengalokasikan TDF sesuai PMK TDF)
Realisasi	99.43%	93.90%	97%	98.89%
Rata-rata	97.28%			
Target	84%			
Indeks Capaian IKU	115.8			

Dengan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 84 %, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi tingkat kualitas monitoring DTU sebesar 97,28% sehingga indeks capaiannya melampaui target sebesar 115,8 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 41.

Tabel 36. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU

K-Two Dit.DTU	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU : 6b – N Tingkat Kualitas Monitoring DTU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	84%	84%	MAX/TLK
Realisasi	39,8	68,16	68,16	86,94	86,94	97,28%	97,28%	
Capaian	120	120	120	120	120	115,8	115,8	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU telah masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah 80% dengan realisasi sebesar 86,2%, tahun 2022 ini target ditetapkan sebesar 82% dengan capaian realisasi 92%, tahun 2023 dengan target 83% memperoleh realisasi sebesar 100,06% serta tahun 2024 dengan target 84% berhasil mencapai realisasi 97,28%. Apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 37. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU Tahun 2021 – 2023

IKU	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kualitas monitoring DTU	80%	86,2%	82%	92%	83%	100,06%	84%	97,28%

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DTU yang melampaui target didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll;
2. Mempermudah prosedur pelaporan dan monitoring pemda dengan memanfaatkan form penyampaian laporan syarat salur DBH DR;
3. Pemberian sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau penghentian penyaluran DBH apabila tidak menyampaikan syarat salur DBH.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DTU ini, antara lain adalah:

1. Kepatuhan pemda dalam penyampaian syarat salur yang masih kurang maksimal;
2. Pergantian pegawai terkait di pemda yang menyebabkan keterlambatan pembuatan dan penyampaian syarat salur terkait;
3. Syarat salur yang disampaikan pemda tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga perlu ada perbaikan laporan syarat salur yang dikirimkan;
4. Pemda belum terbiasa melaporkan laporan syarat salur DBH DR menggunakan form penyampaian laporan, sehingga perlu memasifkan penyampaian laporan dengan form tersebut.

Adapun rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTU antara lain sebagai berikut:

1. Penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif pada setiap kesempatan;
2. Melakukan reminder kepada pemda yang wajib menyampaikan laporan syarat salur tetapi belum menyampaikannya melalui grup koordinasi;
3. Monitoring dan Evaluasi Laporan Syarat Salur DAU Specific Grant TA 2024;
4. Pengembangan aplikasi terkait penyampaian syarat salur oleh Dit SIPT.

5c – N | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti

IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. IKU ini Terdiri atas 3 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase Polrec hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik Polrec.
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 40%) => UIC Ir I s.d VII dan IBI.
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBI

IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari Itjen. Adapun formula penghitungan Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

$$\text{Capaian} = (\text{Sub IKU 1} \times 30\%) + (\text{Sub IKU 2} \times 40\%) + (\text{Sub IKU 3} \times 30\%)$$

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *take last known*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 102,04.

Tabel 38. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti

K-Two Dit.DTU	SS: 5. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU : 5c - N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP

Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	MAX/TLK
Realisasi	35%	110%	110%	120%	120%	120	120%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	97	97	97	97	97
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	98
Realisasi	-	-	-	-	100

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Telah menerbitkan Surat nomor ND-80/PK.2/PK.21/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terkait Tanggapan atas Penerusan Surat Permintaan Data/Dokumen ke-lima dalam Rangka Pemeriksaan Interim atas LKPP Tahun 2024.
2. Berkoordinasi dengan bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terkait tindak lanjut rekomendasi.
3. Menerbitkan Nota Dinas nomor ND-327/PK.2/2024 hal Tanggapan atas Permintaan Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat DTU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bagian OKI Setditjen PK dan Dit. SIPT.

6a – CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur a. Efektivitas komunikasi publik, b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi), c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

Pembagian komponen

- **Unsur 1 : Efektivitas Komunikasi Publik**
Mengukur Kampanye komunikasi publik oleh Biro KLI di luar (non) agenda setting
- **Unsur 2 : Partisipasi Agenda Setting**
mengukur partisipasi penyusunan AS dari masing-masing bagian serta implementasi taktik dan pesan kunci dari masing-masing bagian sesuai yang ditetapkan dalam dokumen AS
- **Unsur 3 : Employee Advocacy**
Mengukur partisipasi pegawai dalam mengampilkasi konten Kemenkeu di program Employee Advocacy sesuai dengan taktik topik proaktif Agenda Setting
- **Unsur 4 : Penanganan Isu Negatif**
Merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu.
- **Unsur 5 : Implementasi Hasil Rakor Kehumasan**
Merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi hasil Rakor Kehumasan Kemenkeu yang melibatkan kolaborasi Biro KLI sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal dengan antar unit eselon I maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM, serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan=

(capaian efektivitas komunikasi publik x 25%) + (Partisipasi Agenda Setting x 35%) + (Employee Advocacy x 10%) + (Penanganan Isu Negatif x 25%) + (Implementasi Hasil Rakor Kehumasan x 5%)

Capaian kinerja Direktorat DTU atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Tabel 40. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-One DJPk	SS: 7. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU : 7a – CP Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	117,25	120	120	120	120	120	120	
Capaian	117,25	120	120	120	120	120	120	

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71 dan Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Dan target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77, pada tahun 2023 terjadi perubahan target menjadi 100 dengan realisasi 120, dan pada tahun 2024 target sama dengan sebelumnya yaitu 100 dengan realisasi 120.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam jangka menengah 5 tahunan.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2020-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	3,55
Standar nasional	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100	100
Realisasi	3,77	3,77	120	120

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan *employee advocacy*.
2. Melaksanakan penyusunan agenda setting bulanan, mengimplementasikan taktik komunikasi, ikut mengamplifikasi konten medsos sesuai topik agenda setting.
3. Melaksanakan dukungan *employee advocacy* sesuai agenda setting dan target yang telah ditetapkan (realisasi/target), meliputi EA 1 (79/66), EA 2 (75/66), EA 3 (102/66), EA 4 (89/66).
4. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif.
5. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Terkait partisipasi agenda setting DJPK diperlukan daftar kegiatan yang dilakukan DJPK yang melibatkan Pemda, namun informasi terkait kegiatan belum terinformasikan dengan baik.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Terus berkoordinasi dengan Bagian UKLI DJPK untuk memantau dan melaksanakan upaya pencapaian IKU.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat DTU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian indeks efektifitas ekosistem kehumasan.
2. Melanjutkan pelaksanaan program Employee Advocacy di lingkungan Direktorat DTU tahun 2025.
3. Berkoordinasi dengan bagian UKLI DJPK terkait Agenda Setting.

6b – N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal merupakan IKU yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat DTU yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

IKU ini merupakan salah satu IKU mandatory Kemenkeu-Two-Three DJPK. IKU ini mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Dana Transfer Umum dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II DJPK, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK).

Adapun yang menjadi dasar perhitungan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan adalah dengan mengukur Kualitas Pengelolaan Arsip. Dasar perhitungan Kualitas Pengelolaan Arsip tersebut diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh Arsip Nasional RI (ANRI) kepada KemenPAN-RB.

Untuk mengetahui Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diukur sebagai berikut:

Semester I:

$$\begin{aligned} &\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (berdasarkan instrumen pengawasan hasil verifikasi Tim Pengawas)} \\ &+ \\ &\text{Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan} \end{aligned}$$

Semester II:

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal atau KMK Penetapan Nilai)

+

Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan

Rekomendasi yang Dipenuhi		Indeks Pemenuhan Rekomendasi
1. Pelaporan arsip aktif periode penciptaan Desember 2023 s.d. Mei 2024 kepada Sekretariat DJPK selaku UK II		
a. Dilaporkan pada bulan Juni 2024		4.6
b. Dilaporkan antara tanggal 1 s.d. 15 Juli 2024		3.4
2. Pelaporan arsip aktif periode penciptaan Juni s.d. November 2024 kepada Sekretariat DJPK selaku UK II		
a. Dilaporkan pada bulan Desember 2024		4.6
b. Dilaporkan antara tanggal 1 s.d. 15 Januari 2024		3.4
3. Pelaporan arsip vital kepada Sekretaris DJPK selaku UK II		4.5
4. Pemenuhan persyaratan kompetensi Pengelola Arsip (keikutsertaan dalam <i>E-Learning</i> Kearsipan melalui Kemenkeu Learning Center)		
a. Diikuti oleh Kepala UP		0.9
b. Diikuti oleh Koordinator Pengelola Arsip		0.9
c. Diikuti oleh Subkoordinator Pengelola Arsip		0.9
d. Diikuti oleh Pengelola Arsip		0,9 (per orang)

Adapun aspek yang dinilai dalam pengawasan kearsipan internal terdiri atas 4 aspek rekomendasi kearsipan, yaitu:

- a. Pelaporan arsip aktif periode penciptaan Desember 2023 s.d. Mei 2024;
- b. Pelaporan arsip aktif periode penciptaan Juni s.d. November 2024 kepada Sekretariat DJPK selaku UK II;
- c. Pelaporan arsip vital;
- d. Pemenuhan persyaratan kompetensi Pengelola Arsip (keikutsertaan dalam E-Learning kearsipan melalui kemenkeu learning center).

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi *maximize* dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode).

Dengan target IKU sebesar 91 pada tahun 2024, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan internal sebesar 111,12 berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-127/PK.1/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal : Pemberitahuan Realisasi IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal Periode Triwulan IV Tahun 2024 serta Penyampaian Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 45.

Tabel 42. Realisasi IKU nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat DTU tahun 2024

No	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks
----	----------------------------	--------------

A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI (Dituangkan dalam KMK No 722/KM.1/2024)	97,42
B.	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan	13,7
1.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode I Tahun 2024	4,6
2.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode II Tahun 2024	4,6
3.	Pelaporan Arsip Vital	1,40
4.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip (Keikutsertaan dalam E-Learning Kearsipan)	
	a. Kepala UP	0,90
	b. Koordinator Pengelola Arsip	0,90
	c. Subkoordinator Pengelola Arsip	0,90
	d. Pengelola Arsip	1,80
TOTAL		111,12

Dengan demikian indeks capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 sebesar 111,92 (melampaui target sebagaimana disajikan dalam tabel 46) sebagai berikut:

Tabel 43. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

K-Two DTU	SS: 8. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	8d – N Nilai Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	91	91	91	91	91	91	91	MIN/TLK
Realisasi	91	111,12	111,12	111,12	111,12	111,12	111,12	
Capaian	100	107,05	107,05	107,05	107,05	120	120	

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu 91 namun lebih tinggi dari 2022 sebesar 71.

Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

IKU	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	71	92,66	91	100,94	91	111,12

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Penunjukan Pengelola Arsip di Lingkungan DJPK melalui Kepdirjen Nomor KEP-16 /PK/2023.
2. Mengikuti kegiatan Bimtek Penggunaan Modul Kearsipan pada Aplikasi Nadine (26 Februari 2024).
3. Menindaklanjuti catatan pada kertas kerja pengawasan kearsipan.

4. One on One meeting dengan Arsiparis DJPK terkait penggunaan modul kearsipan pada tanggal 29 Februari 2024.
5. Pelaksanaan ntry Meeting Pengawasan Kearsipan dengan Biro Umum pada tanggal 31 Mei 2024.
6. Pelaporan daftar arsip aktif Direktorat DTU periode penciptaan 1 Juni–30 November 2024 telah dilakukan pada tanggal 24 Desember 2024 melalui Nota Dinas Direktur DTU kepada Sekretaris DJPK Nomor ND-1088/PK.2/2024.
7. Pelaporan daftar arsip aktif Direktorat DTU periode penciptaan 1 Desember 2023-31 Mei 2024 telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2024 melalui Nota Dinas Direktur DTU kepada Sekretaris DJPK Nomor ND-470/PK.2/2024.

Keberhasilan Direktorat Dana Transfer melampaui target nilai pengawasan kearsipan internal didukung adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Nilai pengawasan kearsipan internal yaitu:

1. Mewajibkan pengelola kearsipan untuk mengikuti diklat kearsipan dan studi banding kearsipan ke unit organisasi di luar DJPK untuk meningkatkan pemahaman pejabat/pegawai mengenai kaidah, prinsip dan standar kearsipan.
2. Menyeleksi serta melakukan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah Direktorat Dana Transfer Umum ke Unit Kearsipan Sekretariat DJPK untuk mengatasi terbatasnya ruang penyimpanan arsip di Direktorat Dana Transfer Umum.
3. Melaksanakan pemberkasan arsip elektronik secara rutin.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal telah dilakukan pengelolaan arsip berbasis elektronik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan sarana dan prasarana kearsipan.

Rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kearsipan internal melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani arsip, antara lain berupa pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait pengelolaan kearsipan serta ikut serta dalam studi banding kearsipan.
2. Koordinasi dengan Unit Kearsipan DJPK dalam hal pengelolaan kearsipan.
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2022, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam

dokumen pelaksanaan anggaran, IKU ini menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 45. Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Triwulan	Konsistensi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	Formula Perhitungan								
Capaian IKU PKPA Triwulan I	25%	30%	35%	10%	Nilai Triwulan = konversi (Nilai TW I + Nilai TW II + Nilai TW III + Nilai TW IV)/4 <table><tr><th>Capaian PKPA</th><th>Konversi nilai</th></tr><tr><td>x=100</td><td>115</td></tr><tr><td>99,5<x<100</td><td>99,5+(x-99,5)/0,225</td></tr><tr><td><99,5</td><td>sesuai dengan nilai PKPA</td></tr></table>	Capaian PKPA	Konversi nilai	x=100	115	99,5<x<100	99,5+(x-99,5)/0,225	<99,5	sesuai dengan nilai PKPA
Capaian PKPA	Konversi nilai												
x=100	115												
99,5<x<100	99,5+(x-99,5)/0,225												
<99,5	sesuai dengan nilai PKPA												
Capaian IKU PKPA Triwulan II	25%	30%	35%	10%									
Capaian IKU PKPA Triwulan III	25%	30%	35%	10%									
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	25%	30%	35%	10%									

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Pada tahun 2024, IKU ini memperoleh capaian realisasi sebesar 105,83% dari target 96,5% dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2024 memperoleh indeks capaian sebesar 110,8

Tabel 46. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU

K-two Dit. DTU	SS : 8. Pengelolaan keuangan yang optimal IKU : 8a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
	T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
								Pol/KP

Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/TLK
Realisasi	115%	115%	115%	99,99%	107,5%	93,33%	105,83	
Capaian	120	120	120	104,7	112,6	97,7	110,8	

Tabel 47. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU TW IV Tahun 2024

Unit	Konsistensi (25%)	Penyerapan (30%)	Capaian Output (35%)	UP/TUP (10%)	Realisasi IKU PKPA Eselon II TW 4
Dit. DTU	98,48%	80,56%	100%	95,5%	93,33%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renca Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat DTU adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 48. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	95%	95%	95%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2024	-				
Renja DJPK tahun 2024	-				
Standar nasional	-				
Target pada Kontrak Kinerja	97%	97%	97%	96,1%	95,5%
Realisasi	96,69	63,64	93,23	108,10	105,83

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja tersebut, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2019 memiliki target IKU sebesar 95% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 86,84. Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 dengan target 97% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 96,69% dan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 63,64%. Kemudian target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 96% dengan capaian realisasi 93,23%, tahun 2023 dengan target 96,1 realisasi sebesar 108,10, dan pada tahun 2024 dengan target 95,5 Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi sebesar 105,83.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam renstra pada tahun 2020-2022 adalah sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Nilai realisasi capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 Direktorat DTU yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan strategi percepatan pencapaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam jangka menengah 5 tahunan berhasil sesuai yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian pelaporan SAKTI, Smart, dan e-monev bappenas triwulanan secara tepat waktu;
2. Penyesuaian RPD setiap triwulan tahun 2024;
3. Monitoring dan evaluasi capaian output bulanan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan tahun 2024.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Dana Transfer Umum disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD.
- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan.
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan Revisi POK untuk optimalisasi anggaran.
- e. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian output dan penyerapan anggaran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu :

1. Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang sudah ditetapkan karena terdapat pergeseran kegiatan, sehingga diterapkan strategi untuk mengatasinya.
2. Adanya penambahan anggaran di trwiulan 3-4 menyebabkan kegiatan terkumpul pada triwulan 3 sampai dengan triwulan 4.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan rapat internal khusus untuk membahas Rencana Penyerapan Anggaran yang belum maksimal.
2. Melakukan one on one meeting dengan Bacankeu membahas RPD serta pemantauan penyerapan anggaran.

Rencana aksi dan strategi ke depan dalam upaya pencapaian target IKU adalah melakukan koordinasi internal untuk perbaikan perencanaan konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana serta pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala (bulanan).

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DTU tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024. Nilai tersebut mengalami perubahan dalam tahun berjalan disebabkan adanya penambahan ke dalam anggaran Direktorat DTU sebesar Rp1.739.042.000 untuk kegiatan rekomendasi kebijakan DAU. Sehingga dari pagu awal tahun sebesar Rp 2.450.592.000 menjadi Rp 4.527.522.000.

Tabel 49. Realisasi Anggaran Direktorat DTU Tahun 2024

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1. Program Belanja Negara			
f. Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/ Penyuluhan Transfer ke Daerah, serta Hibah	721.300.000	718.633.043	99,6%
g. Peraturan terkait Transfer ke Daerah	135.957.000	135.798.245	99,89%
h. Rekomendasi Kebijakan TKD (RM)	237.492.000	235.642.168	99,51%
i. Rekomendasi Kebijakan TKD (Hibah Sinergis)	1.739.042.000	1.397.633.254	80,37%
j. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	323.738.778	305.028.111	94,3%
2. Program Kebijakan Fiskal			
c. RPP DBH Perkebunan Sawit	178.066.000	178.000.825	99,97%
d. PMK Turunan PP Terkait UU HKPD	832.061.000	828.468.787	99,57%
3. Program Pengelolaan Organisasi dan SDM			
b. Dukungan Pelaksanaan ZI WBK pada Direktorat DTU	38.838.000	38.604.433	99,4%
Direktorat DTU	4.527.522.000	3.837.816.866	84,77%

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DTU baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.

C. Kinerja Lainnya

Selama tahun 2024, Direktorat DTU senantiasa mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi sebagai berikut:

1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat DTU meraih Nilai sebesar 111,12

No.	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks					
		Direktorat DTU	Direktorat DTK	Direktorat DDIOKK	Direktorat PDRD	Direktorat P2D	Direktorat SIPT
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI (dituangkan dalam KMK No. 772/KM.1/2024)	97,42	95,54	95,83	99,40	99,24	100,00
B.	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan	13,70	13,70	11,90	17,30	13,70	11,00
1.	Pelaporan Arsip Aktif Periode I Tahun 2024	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
2.	Pelaporan Arsip Aktif Periode II Tahun 2024	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
3.	Pelaporan Arsip Vital	-	-	-	4,50	-	-
4.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip (keikutsertaan dalam E-Learning Kearsipan)						
	a. Kepala UP	0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
	b. Koordinator Pengelola Arsip	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	-
	c. Subkoordinator Pengelola Arsip	0,90	0,90	-	-	0,90	-
	d. Pengelola Arsip	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Total		111,12	109,24	107,73	116,70	112,94	111,00

2. Masuk dalam kategori Keberlanjutan Predikat ZI menuju WBK dengan nilai 92,42

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2024

Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBK

No.	Unit Kerja	Nilai	Pertimbangan	Rekomendasi Penguatan Integritas
1	Direktorat Dana Transfer Umum (DTU)	92,42	a. Berdasarkan hasil penilaian atas dokumen yang telah diunggah pada Aplikasi DIA Kemenkeu (dia.kemenkeu.go.id), Direktorat DTU memperoleh nilai sebesar 92,42. Nilai tersebut telah memenuhi persyaratan ZI menuju WBK. b. Direktorat DTU telah melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI WBK/WBBM dan KMK Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan kedalam aplikasi DIA. Dokumen pendukung dimaksud telah sejalan dengan hasil observasi dan wawancara pada saat <i>field evaluation</i>.	Menjaga komitmen bersama seluruh pegawai untuk menjadikan unit kerjanya Wilayah Bebas dari Korupsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

BAB 4

Penutup

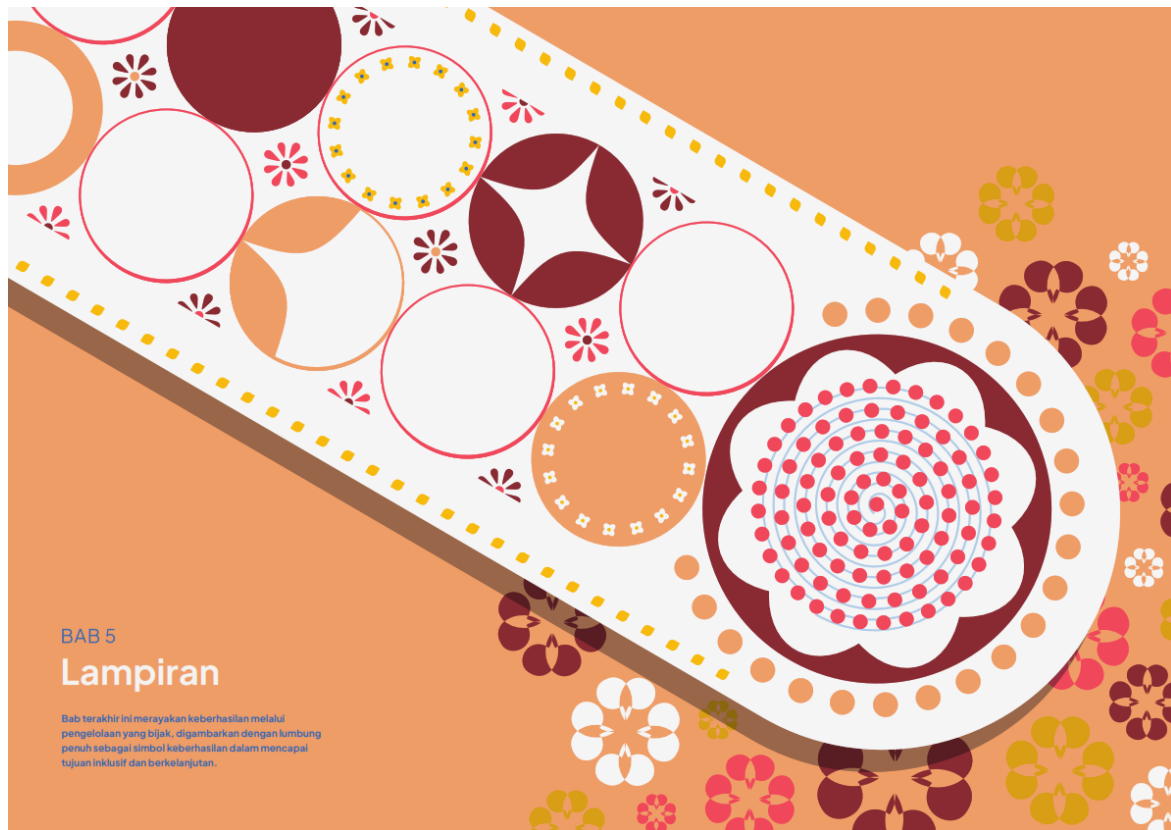
Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambungkan transisi yang mulus dan berkelanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DTU tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DTU dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 4 sasaran program/kegiatan, 7 sasaran strategis, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 13 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2024 13 (tiga belas) IKU Direktorat DTU yang berwarna hijau sehingga Direktorat DTU memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,25 dengan rincian nilai sebesar 106,37 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 111,45 dari bidang *customer perspective* (20%), 116,81 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 115,41 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, Direktorat Dana Transfer Umum siap melakukan perbaikan terus-menerus dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan kedepannya dengan meningkatkan kinerja secara aktif dan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan guna peningkatan kinerja.

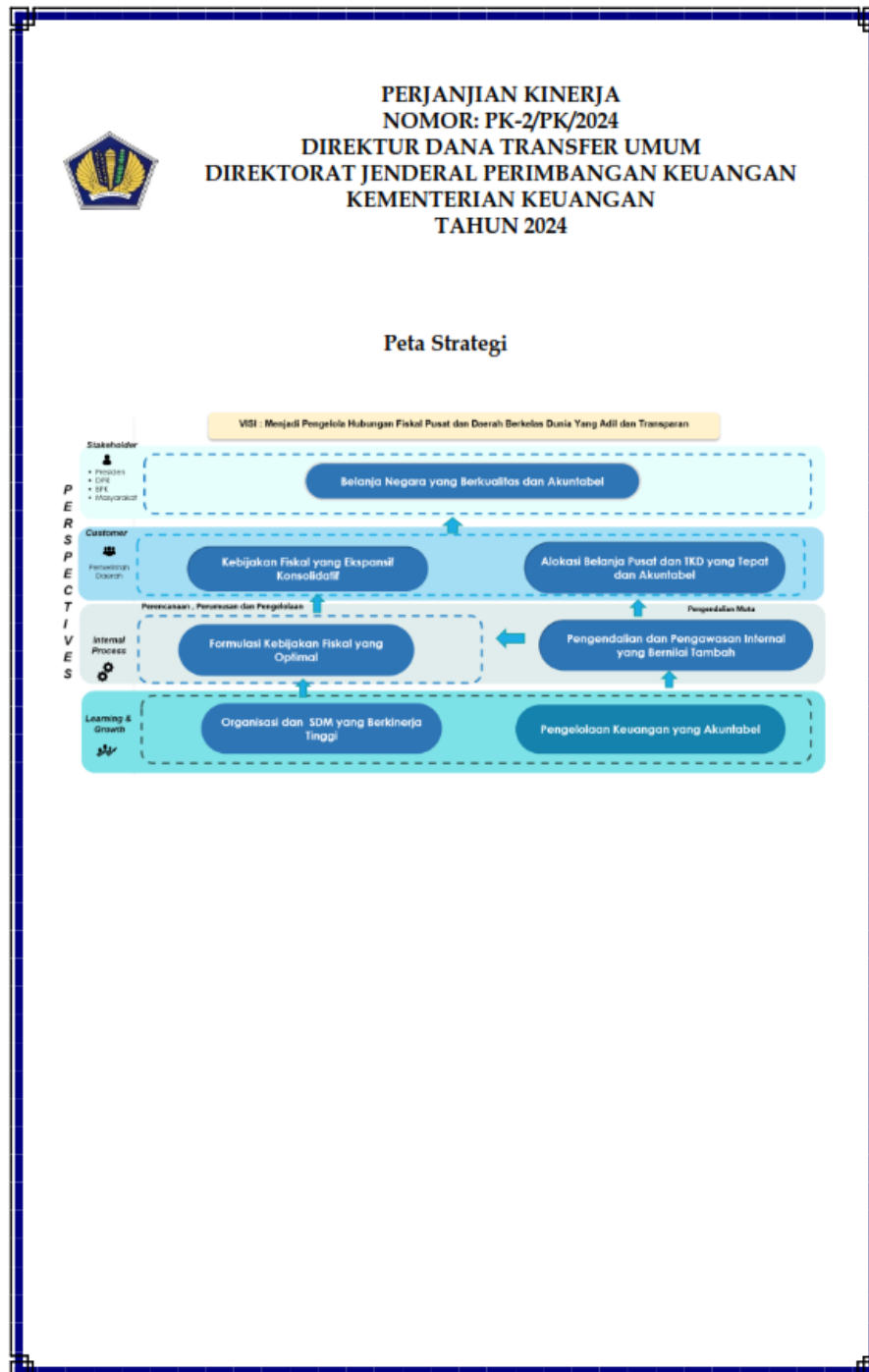


BAB 5 Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung perahu sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.

BAB V LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88
		1b-CP Indeks integritas organisasi	100
		1c-N Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	4,67
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	4,28%
		3b-CP Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4b-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	5a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91 %
		5b-N Tingkat kualitas monitoring DTU	84 %
		5c-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98 %
6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	6a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		6b-N Nilai Pengawasan Kearsipan	91
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	7a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Program Belanja Negara	Rp	1.239.460.000
a. Bimtek Transfer ke Daerah	Rp	489.950.000
b. Peraturan terkait Transfer ke Daerah	Rp	126.000.000
c. Rekomendasi Kebijakan TKD	Rp	234.910.000
d. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah	Rp	388.600.000
2. Program Kebijakan Fiskal	Rp	233.924.000
RPP DBH Perkebunan Sawit	Rp	233.924.000

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
1c-N	Indek Kepuasan Publik atas Layanan DTU	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
3a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	4,28%	4,28%
3b-CP	Indeks ketimpangan antarwilayah	-	-	-	-	-	0,23	0,23
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
5b-N	Tingkat kualitas monitoring DTU	-	-	-	-	-	84%	84%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
6a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Nilai Pengawasan Kearsipan	-	-	-	-	-	91	91
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
7a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Dana Transfer Umum,



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang ditindaklanjuti		
11.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
12.		Nilai pengawasan kearsipan	91	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.	
5	Loyal			

PERILAKU KERJA		
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus
197910292002121002



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 2A/PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-2/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Nama IKU

Sebelum				Menjadi			
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama			Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
6b-N	Indeks pengawasan kearsipan			6b-N	Indeks pengawasan kearsipan internal		

b. Perubahan Target dan/atau Trajectory IKU

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85	-	85	85	85	85	85	85
3a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	4,28%	4,28%	4,53%	6,33%	6,33%	10,34%	10,34%	13,83%	13,83%
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
5b-N	Tingkat kualitas monitoring DTU	-	-	-	-	-	84%	84%	20%	40%	40%	60%	60%	84%	84%
6b-N	Indeks pengawasan kearsipan internal	-	91	91	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91

Jakarta, 26 Juni 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan,

Direktur Dana Transfer Umum,

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Dana Transfer Umum tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	
			Sebelum	Menjadi
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88	84
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	4,28%	13,83%
7	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	95
No	Rencana Hasil Kerja	Sebelum	Menjadi	
12	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks pengawasan kearsipan	Indeks pengawasan kearsipan internal	

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85	-	85	85	85	85	85	85

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	4,28%	4,28%	4,53%	6,33%	6,33%	10,34%	10,34%	13,83%	13,83%
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
5b-N	Tingkat kualitas monitoring DTU	-	-	-	-	-	84%	84%	20%	40%	40%	60%	60%	84%	84%
6b-N	Indeks pengawasan kearsipan internal	-	91	91	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91

Pejabat yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus
197910292002121002

Jakarta, 26 Juni 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002

B. Formulir Pengukuran Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eseleon II : Direktorat Dana Transfer Umum

Tahun Anggaran : 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				106,37
1.	Belanja Negara yang Berkualitas			106,37
1a – CP	Indeks kualitas belanja Pusat dan daerah	84	94,97	113,06
1b – CP	Indeks Integritas Organsiasi	100	106,02	106,02
1c – N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4,67	4,77	102,14
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				111,45
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			102,89
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
2a – CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85	87,46	102,89
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang Tepat dan Akuntabel			120
3a – CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	13,83%	19,68%	120
3b – CP	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,23	0,143	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				114,14
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal			120
4a – N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	117,20	120
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			113,61
5a – CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74

6b – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	84%	97,3%	115,81
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	120%	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				115,41
6.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			113,53
6a – CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	120	120
6b – N	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	91	111,12	120
7.	Pengelolaan keuangan yang optimal			110,82
7b – N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	105,83%	110,82
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,25



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id